



# PPAS

## TAHUN 2023

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
DEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Dasar hukum .....	2
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b> .....	<b>3</b>
2.1 Rencana Pendapatan Daerah .....	3
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	3
2.1.2 Pendapatan Transfer .....	5
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah .....	5
2.2 Rencana Pembiayaan Daerah .....	6
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022</b> .....	<b>174</b>
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b> .....	<b>254</b>
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan .....	254
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan .....	254
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>255</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021 .....	4
Tabel 2.2 Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2021 .....	5
Tabel 2.3 Realisasi dan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020-2021 .....	5
Tabel 2.4 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	6
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pembangunan Nasional .....	8
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....	19
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	49
Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja .....	92
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 .....	174
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan .....	254

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## **1.2 Tujuan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

## **BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

### **2.1 Rencana Pendapatan Daerah**

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp120.005.380.200,- atau naik sebesar 0,99% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan.

Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah mengalami penurunan yakni sebesar Rp9.823.000.000. atau 17,68 %. Pajak Hotel turun sebesar Rp53.000.000. (26,5%), Pajak Restoran turun sebesar Rp1.000.000.000. (35,71%), Pajak Hiburan turun sebesar Rp170.000.000. (48,57%), Pajak Reklame turun sebesar Rp100.000.000. (7,69%), Pajak Penerangan Jalan turun sebesar Rp2.000.000.000. (10%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun sebesar Rp4.000.000.000. (42,85%), Pajak Parkir turun sebesar Rp1.500.000.000. (60%), Pajak Air Tanah turun sebesar Rp400.000.000.(50%), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan turun sebesar Rp100.000.000. atau sebesar 0,99% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan turun sebesar Rp1.500.000.000. (14,28%).
- b. Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp225.500.000. atau 8,8% dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Prosentase penurunan terbesar pada Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp142.500.000. atau sebesar 32,20% selanjutnya pada Retribusi Jasa Umum turun sebesar Rp83.000.000. (5,13%), dan yang terakhir pada Retribusi Perizinan Tertentu diproyeksikan sama besar dengan tahun sebelumnya. Secara rinci, sebagian besar

Retribusi Jasa umum mengalami penurunan. Presentase kenaikan pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan naik sebesar Rp15.000.000. atau sebesar 3% dibandingkan Tahun 2022. Sedangkan beberapa retribusi jasa umum mengalami penurunan diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp53.000.000. atau 70,66%, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp25.000.000. atau 50%, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp20.000.000 atau 4,76%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memiliki nilai yang sama dengan tahun 2022.

- c. Retribusi Jasa Usaha diprediksikan pada tahun 2023 mengalami fluktuasi pada semua sub rincian objek dibandingkan tahun 2021. Prosentase kenaikan terbesar pada Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp5.000.000. atau sebesar 16,67%. Sedangkan Retribusi yang mengalami penurunan diantaranya Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp100.000.000. atau sebesar 50%, Retribusi Terminal sebesar Rp25.000.000. atau sebesar 45,46%, Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp7.500.000. atau sebesar 23,07%, dan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp15.000.000. atau 20%. Dan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan memiliki nilai yang sama dengan Retribusi pada tahun sebelumnya atau tahun 2022.
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar sebesar Rp8.630.000.000. mengalami kenaikan sebesar Rp1.630.000.000. atau 23,28% bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2022.
- e. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp63.311.380.200. mengalami penurunan sebesar Rp626.000.000. atau 0,97% dibandingkan dengan tahun 2022.

Secara rinci pendapatan asli daerah tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2021**

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD
	APBD 2020	APBD 2021	2023
<b>PENDAPATANDAERAH</b>	<b>1.305.720.742.442,99</b>	<b>1.363.454.281.993,95</b>	<b>1.342.110.411.012,00</b>
Pendapatan Asli Daerah	105.893.926.039,99	116.902.688.648,95	120.005.380.200,00
Pendapatan Transfer	1.037.562.389.473,00	1.179.715.146.177,00	1.207.105.030.812,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	162.264.426.930,00	66.836.447.168,00	15.000.000.000,00

*Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022*

### 2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp1.207.105.030.812, atau naik sebesar 0,015% dari tahun 2022. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 – 2021**

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET APBD 2023
	APBD 2020	APBD 2021	
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.133.288.873.244,00</b>	<b>1.179.715.146.176,00</b>	<b>1.207.105.030.812,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat	1.083.577.705.681,00	1.115.655.117.433,00	1.152.866.596.000,00
Transfer Antar Daerah	49.711.167.563,00	64.060.028.743,00	54.238.434.812,00

*Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022*

### 2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2019-2021 kondisinya sangat fluktuatif. Pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp15.000.000.000, atau sama dengan Tahun 2022. Dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2021 dikarenakan adanya penyesuaian hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi komponen Pendapatan DAK Non Fisik.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2020 - 2021**

URAIAN	Realisasi APBD 2020	Realisasi APBD 2021	TARGET APBD 2023
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	20.970.000,00	7.462.975.000,00	15.000.000.000,00
Dana Darurat			
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	66.516.973.159,00	59.373.472.168,00	

*Sumber data : BKAD Kabupaten Padang Pariaman, 2022*

## 2.2 Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah bersumber



dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar Rp56.249.777.262. Dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp56.249.777.262 dan pencairan Dana Cadangan Rp20.000.000.000. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2023 digunakan untuk penyertaan modal yang alokasi anggarannya berdasarkan amanat pada Perda Padang Pariaman. Adapun Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum sebesar Rp.15.000.000.000 dan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi Pemilu tahun 2024 sebesar Rp20.000.000.000.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp41.249.777.262 defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar (Rp292.026.600.830) sehingga terdapat kekurangan (negatif)/defisit sebesar (Rp250.776.823.568).

**TABEL 2.4**  
**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>KODE</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLIDAERAH</b>	<b>120.005.380.200</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	45.727.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.337.000.000
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.000.000
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	63.311.380.200
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.207.105.030.812</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.866.596.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.000.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan hibah	15.000.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.339.280.411.012</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>76.249.777.262</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.249.777.262
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>76.249.777.262</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1.418.360.188.274</b>

## **BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Mendasar pada tema indikatif RKP 2023, prioritas nasional dan tema indikatif RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023, dan indikatif tema Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah: ***Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat***. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Padang Pariaman Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat sektor pertanian, pariwisata dan UMKM.
2. Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing.
5. Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.
7. Peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara' Syaa' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya untuk Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2; Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3; dan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.1**  
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan**  
**Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap**  
**Pembangunan Nasional**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1		<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi aktif		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			persentase koperasi sehat		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase UMKM		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
			Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
			Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakip)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Persentase peningkatan jumlah produksi daging		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Pasar yang Kondusif		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Pasar tertib ukur		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Terwujudnya pasar BANA		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
			Jumlah IKM yang disertifikasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
			Persentase pembangunan sentra IKM coklat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kementerian RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan.		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Tingkat pengangguran terbuka		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase terpenuhinya pelayanan, pemerintahan daerah, nilai sakip perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
			Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi			
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase Total Fertility Rate ( TFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun ( ASFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)		
				INSPEKTORAT DAERAH	
			Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu		

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga		
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase Terpenuhinya Hak Anak		
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		
			DINAS PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG		
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		
			PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			persentase gangguan keamanan yang dapat di redam		
			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Terlaksananya Penataan, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
			Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			



**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Pasar yang Kondusif		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			terlaksananya program pengembangan perumahan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase Temuan BPK yang ditinjakanjuti		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase Relawan yang ikut Pelatihan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)		

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase database kependudukan yang disusun		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Nilai Indeks Pengelola Kearsipan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase terfasilitasinya kebjakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks kualitas perencanaan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Perencanaan Anggaran Tepat Waktu		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase BMD yang tercatat dengan akurat		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
			Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat		

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
			Persentase BMD yang tertib		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
			Persentase Pencapaian Target PAD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	
			Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah0		
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0		
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
			Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
			0Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
			0Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	
			Persentase terpenuhinya pelayananPemerintah Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	
			Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat		
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Presentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan		
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah**  
**Kabupaten Padang Pariaman**  
**dengan Prioritas Pembangunan**  
**Provinsi**

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
90	<b>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</b>				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		8.158.800.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
			DINAS KESEHATAN		79.393.980
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		
			DINAS KESEHATAN		55.655.816.330
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		6.500.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
			DINAS KESEHATAN		248.400.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar		
			DINAS KESEHATAN		61.502.750
			Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar		
			DINAS KESEHATAN		37.275.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS		
			DINAS KESEHATAN		927.007.220
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Tingkat pengangguran terbuka		
			DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		25.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Tingkat produktivitas tenaga kerja		
			DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		268.799.670
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)		
			DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		288.799.300
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)		
			DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		39.999.950
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		
			DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		142.438.446
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase terpenuhnya pelayanan, pemerintahan daerah, nilai sakip perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.848.103.520
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	115.000.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	40.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.384.560.711
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase Total Fertility Rate ( TFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	178.345.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.327.574.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun ( ASFR )		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	77.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Organisasi Pemuda Aktif		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	150.000.000
			Persentase Organisasi Pemuda yang aktif		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.350.000.000
			Persentase Wirausaha Muda		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.350.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah Atlet Berprestasi		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.577.200.000
<b>92</b>	<b>Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)		
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.709.124.855
			Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.327.296.640
			Persentase Temuan BPK yang ditinjakanjuti		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.327.296.640
			persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.327.296.640
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas		



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	545.536.860
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	409.321.780
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	236.983.220
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.945.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	133.729.850
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase Terpenuhinya Hak Anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75.005.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.750.120
			Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.750.120
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.945.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000
			Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	173.875.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			persentase gangguan keamanan yang dapat di redam		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.115.535.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.266.250
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	204.991.500
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah		
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	230.241.800
<b>97</b>	<b>Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010
			Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010
			Skor pola pangan harapan (PPH)		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	19.999.730
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	39.999.850
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				DINAS PERIKANAN	2.981.690.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Benih Ikan		
				DINAS PERIKANAN	59.999.960
			Produksi perikanan budidaya		
				DINAS PERIKANAN	59.999.960
			Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)		
				DINAS PERIKANAN	1.439.401.895
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Cakupan Pembinaan Pokmaswas		
				DINAS PERIKANAN	97.000.000
			Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi		
				DINAS PERIKANAN	97.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Produksi ikan olahan		
				DINAS PERIKANAN	200.000.000
			Tingkat konsumsi ikan		
				DINAS PERIKANAN	200.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.734.586.295

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.734.586.295
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	470.748.200
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.263.838.095
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.400.302.149
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.999.580
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.999.580
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.970.325.769
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050
			Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	1.724.361.200
			Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050
			Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050
			Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050
			Jumlah populasi teranak besar		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.281.530.038
			Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	503.403.971
			Persentase peningkatan jumlah produksi daging		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	770.977.801
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730
			Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730
			Persentase peningkatan fasilitas prasarana peternakan		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	798.862.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	18.529.190
			persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.391.530
			Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	173.874.825
			Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.230.980
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	204.522.840
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.502.500
			Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	56.878.250
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Peningkatan kelas kelompok tani		
				DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	708.287.520
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani		
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	150.000.000
<b>99</b>	<b>Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital</b>				
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Persentase Nagari yang tertata		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Nagari yang telah dibina		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	510.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.178.992.440
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi aktif		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	85.000.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			persentase koperasi sehat		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	76.999.800
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			persentase koperasi yang berkualitas		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.480.699.750
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			persentase koperasi yang melaksanakan RAT		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	35.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	143.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase UMKM		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.096.334.550
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	95.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Pasar yang Kondusif		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	149.998.085
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	59.999.970
			Persentase Koefisien variasi harga antar waktu		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	57.999.910
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	69.992.615
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Pasar tertib ukur		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	199.999.865
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Terwujudnya pasar BANA		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	99.999.950
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000
			Jumlah IKM yang disertifikasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000
			Persentase pembangunan sentra IKM coklat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah Dokumen Data Industri		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000
<b>101</b>	<b>Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	70.000.000
			Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	11.180.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000
			Jumlah Event Promosi Investasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000
			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000
			Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	173.563.840
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
			Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
			Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
			Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	70.502.500
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			0Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	20.000.000
			Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.480.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	419.999.850
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			0Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	370.000.000
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	370.000.000
			Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	814.195.000
<b>102</b>	<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.995.211.090
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.651.177.200
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.395.669.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.372.925.540
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51.565.574.240
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	190.681.327.299
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.503.470.928
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	400.000.000
			terlaksananya program pengembangan perumahan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	80.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Terlaksananya Penataan, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	325.000.000
			Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.722.600.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Terlaksananya program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	50.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400
			Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400
			Persentase Relawan yang ikut Pelatihan		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Terlaksananya Program penatagunaan Tanah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	215.000.000
			Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.379.999.998
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Terlaksananya Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	10.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	90.000.000
			Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	90.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Terlaksananya Pengelolaan Persampahan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	2.115.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)		
				DINAS PERHUBUNGAN	5.464.906.891
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		
				DINAS PERHUBUNGAN	13.818.138.190
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang		
				DINAS PERHUBUNGAN	60.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	66.285.000
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	66.285.000
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	66.285.000
<b>104</b>	<b>Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000
			Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	537.098.130
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.636.717.982
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.412.829.419
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.237.919.419
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95.865.952.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan.		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	140.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KESEHATAN	107.695.355.336
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	6.530.266.274
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)		
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	97.800.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	112.749.780
			Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.018.744.414
			Persentase Temuan BPK yang ditinjaulanjuti		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.093.744.194
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.750.000
			persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daera		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.750.000
			persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.013.495.059
			Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80.249.135
			Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.751.699.318
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.000.500
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	119.665.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.324.070
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang direhabiltasi dan diberikan Bimtek		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	70.542.550
			Persentase PPKS yang direhabiltasi dan diberikan Bimtek		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	264.064.406
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	335.978.730
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	243.554.990
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.823.900
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	46.578.336
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	30.000.000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Terlaksananya program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	13.000.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase terpenuhnya pelayanan pemerintahan daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	3.889.958.057
			persentase terpenuhnya pelayanan, pemerintahan daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	102.856.896
			persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	89.500.000
			persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah daerah, nilai saki perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	190.553.407
			Persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	49.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000
			---		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	150.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhnya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.655.373.325
			Persentase Terpenuhnya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.872.175.288
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	181.410.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	195.505.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	299.525.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase database kependudukan yang disusun		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.510.114
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	435.518.225
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	111.480.750
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.422.873.176
			Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.950.000
			Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	194.852.750
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.875.000
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.875.000
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	236.055.400
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.056.152.367
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.056.152.367
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	888.201.650
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.575.243.623
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
				Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050
				Jumlah Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050
				Jumlah Biaya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050
				Jumlah Biaya Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor lainnya yang di Pelihara	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050
				Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
				Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
				Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	3.365.416.979
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250
				Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250
				Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lppd, Lakip)	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250
				Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	3.365.416.979
				Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000
				Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000
			Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780
			Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
			Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780
			Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD		
				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.600.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.830.910
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800
			Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800
			Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800
			Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800
			Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	37.870.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.451.193.186
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.192.259.590
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.745.968.120

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Nilai Indeks Pengelola Kearsipan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	129.760.000
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	129.760.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	103.405.370
			Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	103.405.370
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	22.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PERIKANAN	3.924.830.374
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				DINAS PERIKANAN	3.924.830.374
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERIKANAN	3.924.830.374
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Benih Ikan		
				DINAS PERIKANAN	620.000.000
			Produksi perikanan budidaya		
				DINAS PERIKANAN	620.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.278.035.577
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)		
				DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.041.996.914
			Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman		
				SEKRETARIAT DAERAH	2.145.892.570
			Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB		
				SEKRETARIAT DAERAH	442.505.130
			Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB		
				SEKRETARIAT DAERAH	442.505.130
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				SEKRETARIAT DAERAH	132.724.092
			Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti		
				SEKRETARIAT DAERAH	22.780.986.350
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	2.145.892.570
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				SEKRETARIAT DAERAH	8.468.589.067
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri		
				SEKRETARIAT DAERAH	290.000.000
			Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	385.000.000
			Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat		
				SEKRETARIAT DAERAH	4.526.000.820
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman		
				SEKRETARIAT DAERAH	45.000.000
			Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD		
				SEKRETARIAT DAERAH	399.999.800
			Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu		
				SEKRETARIAT DAERAH	175.000.000
			Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu		
				SEKRETARIAT DAERAH	399.999.800
			Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian		
				SEKRETARIAT DAERAH	154.999.890
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				SEKRETARIAT DPRD	178.750.000
			Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
				SEKRETARIAT DPRD	50.864.900
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		
				SEKRETARIAT DPRD	939.999.480
			Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui		
				SEKRETARIAT DPRD	410.515.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.710.276.811
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.710.276.811
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.710.276.811
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks kualitas perencanaan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.134.074.305
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	552.971.775
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	147.328.040
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	147.328.040
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	9.748.918.178
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Perencanaan Anggaran Tepat Waktu		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	684.348.000
			Persentase kualitas laporan keuangan daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	470.179.730
			Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	179.403.220.600
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase BMD yang tercatat dengan akurat		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630
			Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630
			Persentase BMD yang tertib		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.368.660
			Persentase Pencapaian Target PAD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.368.660
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			0Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.651.020
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.799.145.886
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.022.166.946
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	723.327.920
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.799.145.886
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			0Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	879.095.720
			Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terserap		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859
			Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	708.949.139
			Persentase Peningkatan Terasiliasinya pindah/purna tugas PNS		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.131.451.737
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	358.433.505
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)		
				INSPEKTORAT DAERAH	6.817.890.465
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase pengawasan yang dilakukan		
				INSPEKTORAT DAERAH	914.370.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan		
				INSPEKTORAT DAERAH	362.188.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	5.460.000
			Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	708.205.569
			Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	2.420.000
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	78.838.500
			Jumlah dik RKA,DPA,RK-P,DPA-P yang disusun		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	13.536.190
			jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	42.112.800
			Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	78.838.500
			Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	264.106.462
			tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	141.136.620
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	7.100.000
			perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	7.100.000
				Persentase terediannya penyediaan jaa penunjang urusan pemerintahan daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	96.859.520
				Persentase terediannya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	29.500.000
				Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	72.110.000
				Persentase terpenuh administrasi keuangan perangkat daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	30.240.000
				Persentase terselenggaranya adminitrasi umum perangkat daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	53.007.227
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	737.926.731
				Administrasi Umum Perangkat Daerah0	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	79.916.770
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	114.382.480
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah0	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	37.802.000
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	399.851.587
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah0	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	6.500.000
				Persentase Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	114.382.480
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	325.324.538
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	665.149.888
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	4.000.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	773.410.026
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	773.410.026
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	773.410.026
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	563.888.982
				Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	16.300.000
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	404.335.763
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	16.300.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	158.931.070
			Peresentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	4.400.000
			Persentase Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	38.120.000
			Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	93.607.300
			Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	1.215.000
			Persentase Perawatan Kendaraan Dinas		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	36.202.500
			0Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	29.685.374
			Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	15.301.250
			Jumlah tenaga Administrasi dan Kebersihan perkantoran		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	119.541.800
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	63.696.000
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	396.196.953
			Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	7.770.000
			Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	73.344.750
			Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	4.600.000
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	5.000.000
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	370.778.107
			Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	38.767.000
			Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	4.600.000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000
			Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000
			"Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	386.786.671
			Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000
			Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	8.500.000
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	123.018.455
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	123.018.455
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	39.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	49.500.000
				---	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	20.000.000
				0Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	45.827.500
				0Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	342.755.423
				0Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	8.990.000
				0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	126.299.360
				0Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	73.398.170
				Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	7.500.000
				Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060
				Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060
				Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	56.008.900
				Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.200.000
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian umum Perangkat daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	203.797.210
				Persentase Keselarasan Dok.Perencana dan Penganggaran Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	7.000.000
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	92.598.200
				Persentase Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	2.200.000
				Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	375.870.150
				Persentase Terpenuhinya Belanja Modal Barang Milik Daerah	

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	20.000.000
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	167.523.133
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	54.498.600
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	22.679.265
				Persentase terpenuhinya pelayananPemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	480.000
				Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000
				Persentase terpenuhinya pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	22.679.265
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	319.611.511
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	373.619.783
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Persentase pelaksanaan pelayanan di kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	5.500.000
				Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	5.306.250
				Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	20.736.250
				Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	1.000.000
				Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	2.650.000
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	8.135.000
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	16.730.000
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	17.250.000
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat0	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	3.000.000
				Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	6.660.000
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	9.715.750
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	9.715.750
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	12.960.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	42.209.506
			Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	5.000.000
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	2.000.000
			Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	17.536.780
			Jumlah UKS yang dapat dibina		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	993.000
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	1.063.000
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	12.500.000
			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	5.000.000
			0Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	29.590.000
			Jumlah Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat		
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.200.000
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	3.980.000
			Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat		
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.830.000
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk.Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.830.000
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		
			persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	32.015.000
			Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	30.398.800
			jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan		
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	30.398.800
			Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa		
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	3.100.000
			Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	38.760.240
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	30.869.000
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	17.460.600
			---		
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	32.500.000
			Persentasi Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah		



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	28.146.350
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	12.985.000
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	13.160.000
				persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	33.422.750
				Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	20.331.500
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	32.500.000
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	32.500.000
				0Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	36.065.500
				Jumlah Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	20.500.000
				Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	18.330.000
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	30.000.000
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	4.990.000
				Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	2.500.000
				Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	9.210.000
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	5.000.000
				Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	2.682.600
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	3.000.000
				Persentase Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal yang Dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	7.300.000
				Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	1.500.000
				Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000
				persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	4.254.800
				---	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	3.000.000
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.500.000
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	2.190.000
				Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	3.500.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	7.220.000
				persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	5.730.000
				Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	45.000.000
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	18.785.000
				PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	16.382.500
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	11.160.000
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	17.650.000
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	9.050.000
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	13.542.500
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	42.006.200
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	10.000.000
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	9.000.000
				Jumlah terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	24.300.475
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	41.200.000
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	3.500.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				persentase terbina dan pengawasan pemerintah desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	12.060.000
				persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	12.060.000
				Jumlah pembinaan administrasi nagari	
				PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	6.623.750
				persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	1.000.000
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	15.890.000
				Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	5.000.000
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	11.580.000
				Persentase terbina & pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	6.000.000
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	1.500.000
				PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000
				Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	12.070.000
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	4.000.000
				terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	4.000.000
				Jumlah Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.000.000
				Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.930.000
				Persentase terbina dan Pengawasan Pemerntahan Desa	
				PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.990.000
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	
				KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.308.958.754

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**  
**berdasarkan Prioritas Daerah**

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>5. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing</b>						
		4.1.5 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing					
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Tingkat pengangguran terbuka			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Tingkat produktivitas tenaga kerja			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	537.599.340	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	284.876.892	
		6.1.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	1.910.000.000	
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42.250.580.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (RSUD)			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	25.214.349.451	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13.029.880.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	288.799.300	
				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	39.999.950	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	40.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.384.560.711		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase Total Fertility Rate ( TFR )				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	178.345.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.327.574.400		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun ( ASFR )				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	77.500.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Organisasi Pemuda Aktif				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	150.000.000		
				Persentase Organisasi Pemuda yang aktif				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.350.000.000		
				Persentase Wirausaha Muda				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.350.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Jumlah Atlet Berprestasi				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.577.200.000		
<b>2</b>	<b>6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang</b>							
		2.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya				
					DINAS PERHUBUNGAN	41.454.414.570		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
				Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang				
					DINAS PERHUBUNGAN	180.000.000		
		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)			
					DINAS PERHUBUNGAN	32.789.441.346	
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53.416.680.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000	
				Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.150.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.995.211.090	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.372.925.540	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51.565.574.240	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	190.681.327.299	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.503.470.928	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				terlaksananya program pengembangan perumahan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	80.000.000	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Terlaksananya Penataan, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	325.000.000		
				Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	452.600.000		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Terlaksananya program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	50.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000		
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				Terlaksananya Program penatagunaan Tanah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				---				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	150.000.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	215.000.000		
				Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.379.999.998		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Terlaksananya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3				



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	10.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	90.000.000		
				Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	90.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	50.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Terlaksananya Pengelolaan Persampahan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	2.115.000.000		
<b>3</b>	<b>1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah</b>							
		3.1.1 Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata						
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi aktif				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	510.000.000		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				persentase koperasi sehat				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	461.998.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				persentase koperasi yang melaksanakan RAT				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	210.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	858.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase UMKM				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12.578.007.300		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Jumlah Pasar yang Kondusif				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.299.987.550		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	419.955.690		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Pasar tertib ukur				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.199.999.190		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Terwujudnya pasar BANA				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	599.999.700		
			3.1.4 Kemandirian Desa					
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Persentase Nagari yang tertata				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70.000.000		
			5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	570.000.000		
			---					
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.000.000		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Nagari yang telah dibina				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	510.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.178.992.440		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				persentase koperasi yang berkualitas				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.480.699.750		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	59.999.970		
				Persentase Koefisien variasi harga antar waktu				
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	57.999.910		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000		
				Jumlah IKM yang disertifikasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000		
				Persentase pembangunan sentra IKM coklat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	17.243.857.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000		
				Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Jumlah Dokumen Data Industri				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	5.000.000	
<b>4</b>	<b>8. Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana</b>						
		4.1.6 Peningkatan Akses dan Mutu Fasilitas pelayanan Kesehatan					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
		Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar					
					DINAS KESEHATAN	61.502.750	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
		Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS					
					DINAS KESEHATAN	927.007.220	
		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti					
					DINAS KESEHATAN	161.591.780	
		6.1.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	57.212.301.370	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
		Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	496.800.000	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
		Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar					
					DINAS KESEHATAN	74.550.000	
		6.1.4 Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan					
					DINAS KESEHATAN	103.678.663.380	
		6.1.7 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
		Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek					
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	141.085.100	
		---					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	31.237.726.060	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.651.177.200		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.395.669.400		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	400.000.000		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.270.000.000		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400		
				Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400		
				Persentase Relawan yang ikut Pelatihan				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.823.490.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.479.017.879		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	277.793.120		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	365.787.906		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	335.978.730	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	243.554.990	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan			
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.823.900	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	115.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.690.780	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.690.780	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.690.780	
<b>5</b>	<b>7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional</b>						
		4.1.5 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing					
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	93.156.672	
		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)			
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	586.800.000	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.233.051.728	
				Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKOMINFO)			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.336.914.202	
				Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.475.808.720	
				Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)			
					DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	36.251.981.484	
		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000	
					DINAS KESEHATAN	107.543.189.986	
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	119.665.100	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.655.373.325	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.056.152.367	
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.192.259.590	
		5.1.2 Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)					
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.664.604.950	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.451.461.738	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	85.800.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	122.492.730	
		5.1.3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas					
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	329.420.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	391.010.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	599.050.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase database kependudukan yang disusun			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.020.228	
		6.1.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	12.960.532.548	
		---					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000	
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261.075.000	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	537.098.130	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.636.717.982	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDIKBUD)			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.412.829.419	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah 97%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi kemenpan RB A, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.237.919.419	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.357.491.600	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan. Nonformal/Kesetaraan.			



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	140.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851		
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.447.696.851		
				Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	112.749.780		
				Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.346.041.054		
				Persentase Temuan BPK yang ditinjakanjuti				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.421.040.834		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.750.000		
				persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daera				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.750.000		
				persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.340.791.699		
				Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80.249.135		
				Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.272.681.439		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	81.000.500		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	30.000.000		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				Terlaksananya program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	13.000.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase terpenuhnya pelayanan pemerintahan daerah, nilai sakiip perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	3.889.958.057		
				persentase terpenuhnya pelayanan, pemerintahan daerah, nilai sakiip perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	1.950.960.416		
				persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah daerah, nilai sakiip perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	89.500.000		
				persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah daerah, nilai sakiip perangkat daerah daerah hasil evaluasi inspektorat, persentase temuan bpk yang ditindaklanjuti (dlhpkpp)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	190.553.407		
				Persentase terpenuhnya pelayanan pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	49.000.000		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	100.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	435.518.225		
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000		
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	111.480.750		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.422.873.176	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.950.000	
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	194.852.750	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.875.000	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.875.000	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	236.055.400	
				Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000	
				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050	
				Jumlah Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050	
				Jumlah Biaya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050	
				Jumlah Biaya Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor lainnya yang di Pelihara			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	295.961.050	
				Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	3.365.416.979	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250	
				Jumlah Dokumen Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250	
				Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakip)			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250	
				Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	92.464.250	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	3.365.416.979	
				Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000	
				Jumlah pakaet pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000	
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	112.940.000	
				Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780	
				Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780	
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	468.730.780	
				Penatausahaan Arsip yang Dinamis pada SKPD			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	542.446.970	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800	
				Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800	
				Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800	
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800	
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	202.130.800	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
				Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	37.870.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.428.468.186	
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Indeks Pengelola Kearsipan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	129.760.000	
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	129.760.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	103.405.370	
				Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	103.405.370	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	22.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					DINAS PERIKANAN	3.924.830.374	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					DINAS PERIKANAN	3.924.830.374	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERIKANAN	3.924.830.374	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Benih Ikan			
					DINAS PERIKANAN	620.000.000	
				Produksi perikanan budidaya			
					DINAS PERIKANAN	620.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.278.035.577	
				Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.145.892.570	
				Nilai SAKIP Pemda Hasil Evaluasi Kemenpan RB			
					SEKRETARIAT DAERAH	442.505.130	
				Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB			
					SEKRETARIAT DAERAH	442.505.130	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					SEKRETARIAT DAERAH	132.724.092	
				Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti			
					SEKRETARIAT DAERAH	22.780.986.350	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.145.892.570	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					SEKRETARIAT DAERAH	8.468.589.067		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri				
					SEKRETARIAT DAERAH	290.000.000		
				Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	385.000.000		
				Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.526.000.820		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman				
					SEKRETARIAT DAERAH	45.000.000		
				Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD				
					SEKRETARIAT DAERAH	399.999.800		
				Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu				
					SEKRETARIAT DAERAH	175.000.000		
				Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu				
					SEKRETARIAT DAERAH	399.999.800		
				Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian				
					SEKRETARIAT DAERAH	154.999.890		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	97.397.400		
				Persentase Layanan Administrasi DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	1.349.939.200		
				Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	17.227.126.157		
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	403.010.950		
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	2.733.737.892		
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	75.000.000		
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	1.359.652.470		
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	1.200.560.000		
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	245.545.900		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Fasilitasi Tugas DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	11.234.407.530		
				Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran				
					SEKRETARIAT DPRD	1.015.554.470		
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
					SEKRETARIAT DPRD	1.541.850.150		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD			
					SEKRETARIAT DPRD	2.235.663.800	
				Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
					SEKRETARIAT DPRD	769.999.695	
				Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui			
					SEKRETARIAT DPRD	410.515.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.837.883.811	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.837.883.811	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.837.883.811	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Indeks kualitas perencanaan			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.134.074.305	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	552.971.775	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	147.328.040	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	147.328.040	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	9.748.918.178	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Perencanaan Anggaran Tepat Waktu			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	734.348.000	
				Persentase kualitas laporan keuangan daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	470.179.730	
				Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat			



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	179.403.220.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase BMD yang tercatat dengan akurat				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630		
				Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630		
				Persentase BMD yang tertib				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	888.208.630		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.368.660		
				Persentase Pencapaian Target PAD				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.368.660		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				0Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.651.020		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.778.455.106		
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.022.166.946		
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	702.637.140		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.778.455.106		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				0Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	879.095.720		
				Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859		
				Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersiapkan				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859		
				Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	708.949.139	
				Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.588.044.859	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.131.451.737	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan			
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	358.433.505	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)			
					INSPEKTORAT DAERAH	6.817.890.465	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase pengawasan yang dilakukan			
					INSPEKTORAT DAERAH	914.370.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan			
					INSPEKTORAT DAERAH	362.188.850	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	5.460.000	
				Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	708.205.569	
				Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	2.420.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	78.838.500	
			Jumlah dik RKA,DPA,RK-P,DPA-P yang disusun				
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	13.536.190	
				jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	42.112.800	
				jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	19.893.725	
				Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang di sediakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	78.838.500	
				Persentase terpenuhi Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	264.106.462	
				tidak tersedianya dan untuk implementasi peraturan perundang-undangan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	141.136.620	
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	9.100.000	
				perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	9.100.000	
				Persentase terediannya penyediaan jaa penunjang urusan pemerintahan daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	105.609.520	
				Persentase terediannya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	29.500.000	
				Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	72.110.000	
				Persentase terpenuh administrasi keuangan perangkat daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	376.008.995	
				Persentase terselenggaranya adminitrasi umum perangkat daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	55.832.227	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	737.926.731	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah0			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	79.916.770	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	114.382.480	
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah0			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	37.802.000	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	399.851.587	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah0			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	6.500.000	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	114.382.480	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	362.764.538	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	702.589.888	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	4.000.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	775.010.026	
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti			
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	775.010.026	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	775.010.026	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	563.888.982	
				Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	16.300.000	
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	404.335.763	
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	16.300.000	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	158.931.070	
				Persentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	4.400.000	
				Persentase Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	38.120.000	
				Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	93.607.300	
				Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	1.215.000	
				Persentase Perawatan Kendaraan Dinas			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	36.202.500	
				0Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	29.685.374	
				Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	15.301.250	
				Jumlah tenaga Administrasi dan Kebersihan perkantoran			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	119.541.800	
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	63.696.000	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	396.196.953	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	7.770.000	
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	73.344.750	
				ersentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	38.615.450	
				Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	4.600.000	
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	60.800.000	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	408.218.107	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	105.767.000	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	145.263.450	
				Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	4.600.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000	
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000	
				"Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	386.786.671	
				Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	9.000.000	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	8.500.000	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	123.018.455	
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	123.018.455	
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	39.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	49.500.000	
				---			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	20.000.000	
				0Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	45.827.500	
				0Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	342.755.423	
				0Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	8.990.000	
				0Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	126.299.360	
				0Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	73.398.170	
				Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	7.500.000	
				Jumlah terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060	
				Jumlah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060	
				Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	56.008.900	
				Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang dipenuhi			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.200.000	
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	337.499.060	
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian umum Perangkat daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	203.797.210	
				Persentase Keselarasan Dok.Perencana dan Penganggaran Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	7.000.000	
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	92.598.200	
				Persentase Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	2.200.000	
				Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	375.870.150	
				Persentase Terpenuhinya Belanja Modal Barang Milik Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	20.000.000	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	167.523.133	
				Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	54.498.600	
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	22.679.265	
				Persentase terpenuhinya pelayananPemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	480.000	
				Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000	
				Persentase terpenuhinya pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	22.679.265	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	319.611.511	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	373.619.783	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Persentase pelaksanaan pelayanan di kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	5.500.000	
				Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	5.306.250	
				Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	20.736.250	
				Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	1.000.000	
				Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	2.650.000	
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	8.135.000	
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	16.730.000	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	17.250.000	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat0			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	3.000.000	
				Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	6.660.000	
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	9.715.750	
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	9.715.750	
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	12.960.000	
				Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	42.209.506	
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	5.000.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	2.000.000	
				Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	17.536.780	
				Jumlah UKS yang dapat dibina			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	993.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	1.063.000	
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	12.500.000	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	5.000.000	
				0Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	29.590.000	
				Jumlah Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.200.000	
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	3.980.000	
				Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.830.000	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk.Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.830.000	
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	32.015.000	
				Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	30.398.800	
				jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	30.398.800	
				Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	13.150.000	
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	38.760.240	
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	30.869.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	26.148.100	
				---			
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	32.500.000	
				Persentasi Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	28.146.350	
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	12.985.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	13.160.000	
				persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	33.422.750	
				Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	20.331.500	
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	32.500.000	
				Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	32.500.000	
				0Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	36.065.500	
				Jumlah Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	20.500.000	
				Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	18.330.000	
				Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	30.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				jumlah kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	4.990.000	
				Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	2.500.000	
				Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	9.210.000	
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	5.000.000	
				Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	2.682.600	
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	3.000.000	
				Persentase Kanrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal yang Dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	7.300.000	
				Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	1.500.000	
				Persentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000	
				persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	4.254.800	
				---			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	3.000.000	
				Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.500.000	
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	2.190.000	
				Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	3.500.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	7.220.000	
				persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	5.730.000	
				Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	45.000.000	
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	18.785.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	16.382.500	
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	11.160.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	17.650.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	9.050.000	
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	13.542.500	
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	42.006.200	
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	10.000.000	
				persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	9.000.000	
				Jumlah terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	24.300.475	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	41.200.000	
				Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	3.500.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				persentase terbina dan pengawasan pemerintah desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	12.060.000	
				persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG	12.060.000	
				Jumlah pembinaan administrasi nagari			
					PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	6.623.750	
				persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	1.000.000	
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	15.890.000	
				Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	5.000.000	
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	2.447.500	
					PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	11.580.000	
				Persentase terbina & pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	6.000.000	
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	1.500.000	
					PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	2.540.000	
				Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	12.070.000	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	4.000.000	
				terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	4.000.000	
				Jumlah Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	2.000.000	
				Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	1.930.000	
				Persentase terbina dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	7.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.990.000	
				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.308.958.754	
<b>6</b>	<b>4. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah</b>						
		1.1.2 Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas			
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.273.221.160	
		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR)			
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	63.292.647.630	
		6.1.6 Pengurangan resiko kebakaran					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.637.287.120	
		---					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	236.983.220		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.945.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	133.729.850		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39.000.000		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase Terpenuhinya Hak Anak				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75.005.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.750.120		
				Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48.750.120		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.945.000.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				ORasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000		
				Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	173.875.000		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				persentase gangguan keamanan yang dapat di redam				
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.115.535.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.266.250	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	204.991.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah			
					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	230.241.800	
<b>7</b>	<b>3. Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan</b>						
		3.1.1 Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)			
					DINAS PERIKANAN	17.272.822.740	
			---				
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010	
				Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010	
				Skor pola pangan harapan (PPH)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	741.999.010	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	19.999.730	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	39.999.850	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					DINAS PERIKANAN	1.316.650.000	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Produksi Benih Ikan				
					DINAS PERIKANAN	59.999.960		
				Produksi perikanan budidaya				
					DINAS PERIKANAN	59.999.960		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Cakupan Pembinaan Pokmaswas				
					DINAS PERIKANAN	97.000.000		
				Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi				
					DINAS PERIKANAN	97.000.000		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Produksi ikan olahan				
					DINAS PERIKANAN	200.000.000		
				Tingkat konsumsi ikan				
					DINAS PERIKANAN	200.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.734.586.295		
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.734.586.295		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	470.748.200		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	11.263.838.095		
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.400.302.149		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.999.580		
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	79.999.580		
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.970.325.769		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050		
				Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	1.724.361.200		
				Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050	
				Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.689.378.050	
				Jumlah populas teranak besar			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.281.530.038	
				Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	503.403.971	
				Persentase peningkatan jumlah produksi daging			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	770.977.801	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
				Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730	
				Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730	
				Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.683.308.730	
				Pesentase peningkatan fasilitasi prasarana peternakan			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	798.862.000	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
				Jumlah penurunan kejadian penyakit jembrana,SE,AI,Rabies			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	18.529.190	
				persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.391.530	
				Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	173.874.825	
				Persentase pengendalian penyakit hewan (PHMS)			
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.230.980	
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
				Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	204.522.840	
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
				Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	8.502.500	
				Persentase Pelayanan Perizinan Bidang Peternakan			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	56.878.250		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Peningkatan kelas kelompok tani				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	708.287.520		
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	150.000.000		
<b>8</b>	<b>2. Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah</b>							
		---						
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	70.000.000		
				Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	11.180.000		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000		
				Jumlah Event Promosi Investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000		
				Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000		
				Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	35.000.000		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	123.563.840		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	393.394.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
				Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	70.502.500	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
				0Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar			
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	20.000.000	
				Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar			
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.480.000.000	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
				Jumlah Kunjungan Wisatawan			
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	419.999.850	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif			
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	200.000.000	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				0Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	370.000.000		
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	370.000.000		
				Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	814.195.000		

**Tabel 3.4**  
**Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja**

**Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											
	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil evaluasi Kemenpan RB Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100 % 100 % 100.BB,100 %,Nilai,%	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sekolah Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Serta sara Prasarana Sekolah	100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji/Tunjangan/Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3834 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio Untuk mengikuti Pelatihan / Bimtek / TOT	94 %	1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	700 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	93 %	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	92 %	1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	56,31 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	58,27 %	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang		
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang			
							1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit		
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang		
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang		
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit		
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket		
							1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket		
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47284 Peserta Didik		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	413 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	799 Peserta Didik		
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2101 Orang		
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	413 Orang		
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	413 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62,56 %	1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang		
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang		
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17184 Peserta Didik		
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	16428 Peserta Didik		
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	62 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	415 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1100 Orang		
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI	52,2 %		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8038 Peserta Didik		
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket 60 Paket		
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik		
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	375 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	495 Orang		
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	495 Orang		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan	375 Satuan Pendidikan		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	52,2 %		1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		
							1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1432 Peserta Didik		
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1432 Peserta Didik		
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	33 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88 Orang		
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	88 Orang		
	<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rasio Pelatihan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Formal dan Non Formal	58,89 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	60,57 %	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	33 Orang		
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rasio Penyusunan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	57,2 %	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		
	<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	52 % 52,2 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan / Penetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52 %	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
	<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100,A,100 %,Nilai,%	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
					Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	932 Orang/Bulan		
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	336 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	94 %	1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	20 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket			
						1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2500 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen			
						1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	84 %	1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			
						1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			
						1.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit			
						1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit			
						1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			
						1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Pariaman		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						1.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit		
							1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit		
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		
							1.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	25 Unit		
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	26 Ha		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Retribusi	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan 85 % Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 68 %		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	100 % 68 %	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		
							1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		
							1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit		
							1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit 1 Unit		
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		
							1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit 2 Unit		
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit		
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		
							1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit		
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit		
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit 3 Unit		
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit 5 Unit		
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	4 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit		
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit		
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Paket	Kab. Padang Pariaman	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8220 Orang		Kab. Padang Pariaman	
				Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85 %						
				Persentase penyediaan Operasional BLUD Rumah Sakit	100 %						
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7847 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6913 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29809 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76631 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245753 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57026 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66611 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5147 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	890 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15590 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9312 Orang		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 25 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	5 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket 5 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit		
							1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5 Dokumen		
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen 25 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit		
							1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan		
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen		
							1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		
						1.02.02.2.03	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	
						1.02.02.2.04	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan	70 %	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	850 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	75 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	70 %	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang 10 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan	70 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	35 Orang	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	60 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35 Sarana	Kab. Padang Pariaman	
							1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	35 Sarana	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi ALat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	3 Lokasi	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen		
							1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	3 Dokumen		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	3 Lokasi	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen		
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	70 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan yang diterbitkan	20 Stiker	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen		
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20 Post Market	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Dokumen		
	<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	76 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	60 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan PHBS	74 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
	<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	95 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %				1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %				1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	75 %	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	80 %	1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	7,95 %	1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,5 KM	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi baik	58,72 %	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	92 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	800 SR	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	800 SR	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	87 %	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1429 Rumah Tangga	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.05.2.01.15 Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 M <sup>3</sup> /Hari	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	70 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	70 %	1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	40 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	40 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	69 %	1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29.98 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	25.69 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	26.73 KM	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	100 M	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	190 M	Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	62.50 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	62.5 %	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Perseetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	90 % 90 %	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	90 %	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	50 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	95 %	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
	<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	terlaksananya program pengembangan perumahan	100 persen	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	1 Dokumen	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi	20 Unit	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		
	<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 persen	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman kumuh yang dibangun pemugaran/peremajaan	3 Ha	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	13 Unit Rumah		
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
								Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3 Ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Terlaksananya program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	100 persen	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	1 Dokumen	1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen		
	<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 persen	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Pemukiman dari Pengembang	1 Dokumen	1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
	<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditinjau/lanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (SATPOL PP DAMKAR) Persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	A 100 % 100 A 100 % Nilai % 100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	92 % 94 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan 42 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	12 Dokumen 11 orang	Kab. Padang Pariaman	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	94 Persen 100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 2 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang 8 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	600 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	370 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan 30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 150 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	10 unit 84 Persen 100 %	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kasubbag. Program)	1 Unit		
							1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 laporan  Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %  Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66 unit  Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 %		1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit		Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit		Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit		Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit		Kab. Padang Pariaman	
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 34 Unit		Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	67.5 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindak lanjuti 65 %		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 23 Kasus			
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 23 Kasus			
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 15 Dokumen			
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen			
							1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 6 Dokumen			
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	% Penegakan Perda 65 %		1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 65 Laporan			
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 67 Laporan			
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS 10 orang  Jumlah PPNS yang ditingkatkan pengetahuannya 2 orang		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 2 Laporan			
	<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana 30 Nagari  Persentase Jumlah Korban Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana 82 %  Persentase Relawan yang ikut Pelatihan 29.12 %		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti 100 %		1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 2000 Orang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 90 %		1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 1 Dokumen			
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 500 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	46 Unit		
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang		
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani	100 %		1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5000 Orang		
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang		
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaannya dokumen regulasi penanggulangan bencana	100 %		1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		
							1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan		
							1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen		
	<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan bahaya kebakaran	85 %	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan		
							1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	6 Dokumen		
			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelamatan yang dilakukan sesuai standar.	79 %		1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	8 Laporan		
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
	<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan	90 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
						1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit			
						1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Padang Pariaman	
	<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	65 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	100 %	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103 Orang		
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang		
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga		
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga		
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat		
	<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang		
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Orang		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani	100 %	1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
	<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	100 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	216157 Orang		
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	67.733 Keluarga		
	<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %		1.06.06.2.02.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		
	<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional yang telah dilaksanakan	100 %	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam		
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>											
	<b>2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Tingkat pengangguran terbuka	6.9 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen RTK Padang Pariaman	1 Dokumen	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan		
	<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Tingkat produktivitas tenaga kerja	70 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang		
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	19 %	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga		
	<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)	70,95 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,95 %	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	75 Orang		
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	11 %	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2430 Orang		
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	5 %	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang		
	<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan	57,9 %	2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	27 Perusahaan		
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	58 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 %	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Dokumen		
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan Daerah dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 %	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang		
	<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan	35 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah		
	<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100 %	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Terpenuhinya Hak Anak	40 %	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksan	40 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36 Organisasi		
	<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	0 Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak	100 %	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>											
	<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) Skor pola pangan harapan (PPH)	2400 Kkal/kap/hari 56,47 Gram/kap/hari 88,9 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina/didampingi Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis Laporan neraca bahan makanan	8 poktan 7 pasar kecamatan 1 dokumen	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan		
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	7 Pasar kecamatan 1 Dokumen		
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	14 Unit		
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) yang diadakan	8 Ton	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L	24 poktan	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH) Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen 0 Dokumen		
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dihadiri Jumlah jambore PKK yang dilaksanakan Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Kali 1 Kali 3 KWT 1 Kali 0 Laporan 1 Laporan		
	<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan pangan	1 nagari	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	aporan sistem kewaspadaan pangan dan giz	1 dokumen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3 Dokumen		
	<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi	85 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah	25 sampel 4 SD	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 Dokumen 4 Sekolah dasar (SD) 0 Dokumen		
							2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 Sampel 0 Sertifikat		
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>											
	<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 2 (satu) daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Terlaksananya program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Bupati tentang Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Belanja Modal Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Terlaksananya Program penatagunaan Tanah	100 Persen	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>											
	<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah Dawrah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (DLHPKPP)	100 A 100 % Nilai % 100 Persen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun jumlah laporan evaluasi yang disusun	1 dokumen 2 laporan 4 laporan	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan asn penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	1 buah 12 bulan	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jumlah laporan tamu fasilitas kunjungan jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah paket penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1 laporan 1 laporan 1 paket 1 paket 1 paket	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan 1 laporan 1 laporan	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara	2 unit 1 unit 1 unit	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0.2 Dokumen		
	<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Terlaksananya Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen 5 Dokumen	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen		
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya Buku Data DIKPLHD	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 5 Dokumen Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Laporan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		
	<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Terlaksananya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kabupaten	10 Ha	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha		
	<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	100 Persen	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5 Dokumen	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan		
	<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen 100 Persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan/izin terdaftar yang PPLH nya Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan	30 Dokumen 5 Dokumen	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
	<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 Persen	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	3 Lembaga Masyarakat 1 Dokumen	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga		
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		
							2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	15 Orang		
	<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	terlaksananya program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1 entitas	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha	1 entitas	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas		
	<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	2 Persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang ikut berperan dalam pengelolaan sampah	30 ton	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30 Ton		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok		
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	300 Ton 4 Unit		
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
	<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDUKCAPIL)	0,-,0 %Nilai,% 100 A 100 % Nilai %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Instalasi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Buah	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	65 %	2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		
							2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Orang	Kab. Padang Pariaman	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	Kab. Padang Pariaman	
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Penerbitan KTP EL, Persentase Penerbitan KK, Persentase Penerbitan KIA	99 100 40 % % %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	100 %	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	17 Kecamatan		
							2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Laporan		
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52 Minggu		
							2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	160 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	434696 Dokumen		
			2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilakukan penataan	100 %	2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	30 SOP			
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan lembaga lainnya dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	70 %	2.12.02.2.03.01 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Kali			
						2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	103 Nagari			
						2.12.02.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 PKS			
						2.12.02.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Tahun			
			2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	80 %	2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	103 Nagari			
						2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	30 Orang			
	<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penerbitan akta kelahiran, Persentase Penerbitan akta perkawinan, Persentase penerbitan akta perceraian	95 100 100 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan	120000 Dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17000 Dokumen		
							2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3220 Dokumen		
							2.12.03.2.01.03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen		
			2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	68 %	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Tahun			
							2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Kali		
							2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	103 Nagari		
							2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	8 OPD/Lembaga		
							2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	140 Orang		
			2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	65 %	2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Kali			
							2.12.03.2.03.03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	17 KUA		
							2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	8 Orang		
	<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		
			2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penataan PIAK	75 %	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	18 SOP			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan PIAK	85 %	2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26 OPD			
						2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan			
						2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan PIAK	77 %	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	103 Laporan			
						2.12.04.2.04.02 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	3000 Dokumen			
						2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah petugas yang mengikuti Bimbingan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diikuti/dilaksanakan	1 Laporan 6 Orang			
	<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase database kependudukan yang disusun	90 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun	2 Dokumen	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
	<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "	100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah "	1 paket	2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase Nagari yang tertata	100 %	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari	100 %	2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa		
							2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa		
							2.13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa		
							2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit		
	<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	0Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Nagari yang menjalin kejasama antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
							2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
	<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	100 %	2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen		
							2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen		
							2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen		
							2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen		
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		
							2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		
							2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan		
							2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen		
							2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang		
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		
	<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	103 Nagari	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen		
							2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen		
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.2.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit		
							2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		
							2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		
							2.13.05.2.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		
							2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
	<b>2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan	100 %	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan	100 %	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang	Kab. Padang Pariaman	
				2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	100 %	2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan	100 %	2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Tahun		
							2.14.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun		
							2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun		
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah	100 %	2.14.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	100 %	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun		
							2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.14.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Orang		Kab. Padang Pariaman	
			2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan	100 %		2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Tahun		Kab. Padang Pariaman	
							2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Tahun		Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase Total Fertility Rate 2.34 % ( TFR )	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan yang disusun	60 %		2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 15 Orang			
							2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Kelompok PIK-R			
							2.14.02.2.01.08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Kelompok PIK-R			
							2.14.02.2.01.13 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 kali			
							2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Laporan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 35 Orang			
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	50 %		2.14.02.2.02.07 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate ( TFR ) 35 Orang				
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 0 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 71 Orang RT			
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Kali Evaluasi			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	65,75 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi		
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dokumen		
								Jumlah dukungan bahan media KIE (Momentum dan kearifan lokal )	1 Kali		
								Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	1 Kali		
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Kali		
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	17 Kali		
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang disediakan jasa Penyuluhan Listrik dan Air	17 Balai		
								Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhi biaya Operasional	17 Buah		
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan		
								Jumlah Orang Kader Pengelohan data	408 Orang		
								Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB	68 Kali		
								Jumlah Pertemuan Orientasi Tenaga Lini Lapangan Yang Dilaksanakan	6 Kali		
								Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB yang dilaksanakan	68 Kali		
								Jumlah Tenaga keamanan dan pramusaji di balai penyuluhan yang disediakan	34 Orang		
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Audit stanting	2 Kali		
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan		
								Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	40 Orang		
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 Organisasi		
								Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34 Orang		
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB	100 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44 Klinik		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor Cabut Implan Jumlah Akseptor Implan Jumlah Akseptor IUD Jumlah Akseptor MOW Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33 Orang 1602 Orang 551 Orang 178 Orang 0 Orang		
							2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase PUS Kelurga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB	0 Dokumen 65 %		
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB Jumlah Operasional Pendamping DAK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Balai Penyuluhan 1 Tahun 0 Unit		
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan Jumlah koordinasi pelayanan KB di faskes Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah pembinaan pelayanan KB di faskes	47 Klinik 1 Kali 0 Laporan 22 Klinik		
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	75 Orang		
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontak bagi PUS ( safari KB di Kecamatan)	0 Laporan 211 Orang		
							2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	17 Orang		
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	13 %		2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Kali 0 Organisasi		
							2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Orang Pertemuan Lintas Sektoral di Kampung KB	0 Dokumen 1 Kali		
							2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah pertemuan kelompok berbasis tribina keluarga yang dilaksanakan Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Wilayah Kampung KB	0 Kampung 21 Kali 21 Kali		
							2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Sergab Kakab dilaksanakan	0 Laporan 3 Kali		
	<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun ( ASFR )	12 Per 1000	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Keluarga yang dibina	72 %	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah pertemuan kelompok UPPKS yang dilaksanakan	0 Kelompok 1 Kali		
							2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pertemuan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi ibu dan Keluarga	0 Laporan 1 Kali		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang		
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Per lomba Program KKBPK yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17 Lomba 0 Laporan		
							2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah orang Duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	0 Laporan 42 Orang		
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>											
	<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISHUB)	100 A 100 % Nilai %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan 25 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	0 Dokumen 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah "	94 %	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Thn 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 Thn	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 %	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Thn 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keseluruhan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah Penyediaan ATK, Prangko, Material, Benda Pos Lainnya cetak dan Penggandaan yang disediakan	0 Laporan 1 Thn	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Thn	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 org/thn	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah penyediaan rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Thn 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	90 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	90 %	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terciptanya Pelaksanaan Rencana induk jaringan LLAJ	0 Laporan 27 Kegiatan	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	0 Unit 100 %	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	0 Unit 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Thn 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Tersedianya sarana dan Prasarana berkala kendaraan Bermotor	0 Unit 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	0 Dokumen 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85 %	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tersedianya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan serta rekayasa lalu lintas	0 Unit 1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan Jalan	0 Laporan 1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	85 %	2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan Terciptanya keterikatan tata kerja antar instansi terkait	0 Dokumen 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
							2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi terlaksananya fungsi sesuai dengan keterikatan kerja	0 Laporan 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	85 %	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Terciptanya pengawasan terhadap turun naiknya angkutan orang dan barang	0 Laporan 1 Thn	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85 %	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	16 Angka (Jumlah Kecelakaan)	2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	16 Jumlah	2.15.05.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				2.15.05.2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	2.15.05.2.03.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
	<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	98 %	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %								
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik kantor	5 Item	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Item Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu kebutuhan cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makanan dan Minuman Tamu	100 Porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		
							2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		
							2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung dan Mesin Lainnya	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materi, benda pos lainnya	15 Item	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 Orang	Kab. Padang Pariaman	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu Pemeliharaan berkala peralatan kantor	12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	88 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik	95 %	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi	81 PPID	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Masyarakat	5 Kelompok	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	40 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	45 Kerjasama	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	62 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi	70 %	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith/Internet Daerah	500 Mbps	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	72 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	57 %	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server	4 Rak Server	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem	1 Pusdatin Pemda	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	32 Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	Kab. Padang Pariaman	
								Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud	57 %	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
								Persentase Kematangan Smart City	84 %	Kab. Padang Pariaman	
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah pengawasan retribusi menara telekomunikasi, Sistem mapping menara telekomunikasi dan identifikasi menara telekomunikasi	160 Menara	Kab. Padang Pariaman	
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>											
	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi aktif	40 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	40.2 %	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Unit Usaha		
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	45 Unit Usaha		
	<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	persentase koperasi sehat	40 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam	40 %	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha		
							2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30 Unit Usaha		
	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	persentase koperasi yang berkualitas	40 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	40 %	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	40 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	35 Orang		
	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.9 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	21 %	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	36000 Unit Usaha		
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha		
							2.17.07.2.01.03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha		
	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase UMKM	97.44 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi	0.6 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	160 Unit Usaha		
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
	<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	5 Dokumen		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	5 Dokumen					
		Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakip)	3 Dokumen		Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (Lppd, Lakip)	3 Dokumen					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen					
							2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Akhir tahun	1 Laporan	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen					
							2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	6 orang	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang					
					Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket					
					Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket					
							2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800 exemplar	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Padang Pariaman	
					jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	1 arsip opd					
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	700 porsi					
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 orang					
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5000 lembar					
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket					
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	180 buah					
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	180 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Menyurat Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 bulan 12 bulan 12 bulan		2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan Gedung Kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan		2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Perbup	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Perbup 2 Dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen		
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen		2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan Usaha 1 Dokumen		
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Event Promosi Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	4 Event 4 Event 1 Dokumen 1 Dokumen	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha		
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha		
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang		
							2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha 1 Kegiatan 1000 Pelaku usaha 1000 Pelaku usaha	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Terciptanya Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan	1 Kegiatan 35 Pelaku Usaha 240 Pelaku Usaha 1 Kegiatan 35 Pelaku Usaha 240 Pelaku Usaha	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	103 Pelaku Usaha		
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha		
	<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok 1 Dokumen	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok 1 Dokumen	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
	<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN</b>	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	55,55 % 00,17 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Mandiri	130 Orang	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang		
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang		
							2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang		
							2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	40 Orang		
							2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	4 Unit		
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang		
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	34 Orang		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	1 Dokumen	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen		
	<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah Atlet Berprestasi	370 Orang	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	100 Orang	2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	0 Unit		
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang mewakili daerah ke tingkat provinsi	5 Cabang Olahraga	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	800 Orang		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan atlet dibina di daerah dan provinsi termasuk kebutuhan khusus	5 Cabang Olahraga	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang		
							2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	600 Orang		
							2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Dokumen		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang berprestasi	38 Cabang Olahraga	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi		
							2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan olahraga masyarakat	6 Kegiatan	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen		
							2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan		
							2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen		
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
	<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada Tersedia	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Sektor	100 %	2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	Jumlah Buku/Laporan data Statistik sektoral Jumlah Data Statistik Sektor yang Dihimpun	2 Buku 1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
	<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	2 Indeks Keamanan	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi	1 Laporan 20 %	Kab. Padang Pariaman	
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>											
	<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Rasio Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya.	7 %	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina	7 %	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek		
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kab./Kota.	7 %	2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit		
	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Rasio Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya.	7 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya.	7 %	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	66 Orang		
	<b>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	50 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	50 %	2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen		
	<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	0Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	50 rasio 50 % 50 rasio	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	50 %	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek		
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek		
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola/terpelihara	50 %	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek		
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	90,30 % 0,50 % 0,40 % 3 0 0,20 0	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT	1500 Pemustaka 8 Perpustakaan 25 % 8 % 30 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	40 Layanan		
							2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan 50 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan nagari/sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai dan di akreditasi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	17 perpustakaan 27 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	350 Eksemplar		
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar		
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi	25 % 15 %	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan sosialisasi budaya baca dan literasi	5 Lokus 50 Peserta		
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang		
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan inklusi sosial	0 Perpustakaan 5 Perpustakaan 50 Peserta		
	<b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	30 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	5 %	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang		
							2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah naskah kuno yang terkumpul, diolah, dan dialihmediakan	0 Eksemplar 20 Naskah Kuno		
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											
	<b>2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISKEARPUS)	100,A,100 %,Nilai,% 100 A 100 % Nilai %	2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laptop	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		
							2.24.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
							2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 63,95 Nilai Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik 16,27 %		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 50 % Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi 50 % Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku 85 %		2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 0 Berkas Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 25000 Berkas Jumlah OPD yang Dibina dalam Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 25 OPD			
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 Berkas Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 50 Berkas Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD 40 Peserta			
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Laporan		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi 10 %		2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN 10 %		2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN 20 Arsip Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 0 Pengguna Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 30 Pengguna			
	<b>2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan 45 % Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan 55 %		2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan 5 Perbup Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK 8 %		2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan	25 Nagari	2.24.03.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0 Arsip		
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentifikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media yang dikelola Lembaga Kearsipan yang sesuai NSPK	400 Berkas Arsip	2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Arsip		
							2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	350 Arsip		
	<b>2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	10 %	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan	10 %	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	10 SOP		
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
	<b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	A Nilai	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen 1 dokumen	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	684 dokumen 5 dokumen 140 dokumen 4 paket 2 paket 4 paket 1 paket	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	684 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 4 dokumen	3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit 29 unit 1 unit	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Produksi Perikanan Tangkap	19.186,93 ton/tahun	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	18 unit	3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	15 Unit		
							3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	18 Unit		
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	34 kelompok 100 persil	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	34 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi	100 Unit Usaha		
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 unit	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan			
	<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Produksi Benih Ikan 510.000.000 ekor/tahun Produksi perikanan budidaya 55.725,72 ton/tahun	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	6 kelompok	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	6 Kelompok			
						3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100 Kelompok			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 sampel 1 paket 5 paket	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit			
						3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit			
						3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	7 Dokumen			
	<b>3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Cakupan Pembinaan Pokmaswas 100 % Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi 80 %	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen 1 dokumen	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen			
						3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
	<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Produksi ikan olahan 187,07 ton/ tahun Tingkat konsumsi 44,95 kg/ kapita/ tahun	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan skala Usaha dan Resiko	1 paket buku	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen 2 Dokumen			
			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap persyaratan perizinan berusaha pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai skala Usaha dan resiko	15 kelompok	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha			
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1498.24 ton	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1498.24 Ton			
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>											
	<b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat BB Huruf	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	11 Dokumen	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman		
						3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman		
			3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %	3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.26.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	5 DTW	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5 DTW	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 DTW		
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	1 KAW	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit		
							3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	7 DTW	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit		
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang diterbitkan	10 Dokumen	3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan		
							3.26.02.2.04.05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1 Unit Usaha		
	<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	275000 Orang	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan		
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		
	<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Bantuan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Unit	3.26.04.2.02.04 Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	5 Unit		
	<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	280 Orang	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi	280 Orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	280 Orang		
							3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang		
							3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang di latih	45 Orang	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	600 Orang		
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>											
	<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A Nilai	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laopran evaluasi yang disusun (LPPD, LAKIP, Laporan Realisasi Program/kegiatan per bulan dan triwulan serta perjanjian kinerja (PK) dan laporan Statistik Pertanian	5 Dokumen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB Nilai		Jumlah Dokumen perencanaan	3 dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (Renja/RKT, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RUP, e-Proposal Kementan RI)	7 Dokumen					
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	94 %								
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah	100 %								
		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100 %								
							3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	1 Tahun		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		
					Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	19 dokumen					
					Jumlah pengelolaan keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) DistanKP yang dibayarkan honorinya selama 1 tahun	12 Bulan					
							3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
							3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur DistanKP yang mengikuti bimtek/workshop	10 orang	3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/studi komparatif berdasarkan tugas dan fungsi	2 orang					
					Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	135 orang					
					peningkatan kapasitas jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	20 Orang					
							3.27.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Padang Pariaman	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUmlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti Jumlah Makanan dan Minuman Harian dan Makan Minum Tamu yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor Yang Daidakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-undangan yang Diadakan Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Paket 175 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1800 exemplar 1 Tahun		3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket 1 Paket/tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen 1800 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Kali 1 Tahun 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit 1 paket 1 Paket 1 paket		3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		
							3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor, percetakan, penggandaan, materai yang diadakan Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang diadakan Jumlah tenaga swakelola yang dibayarkan honorariumnya Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 paket 1 paket 12 kali 27 orang 1 Tahun		3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	1 Paket 100 %	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 12 Unit 137 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan Persentase peningkatan jumlah produksi daging Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan	0 Varietas 45 % 17 % 17 % 85 % 85 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 poktan 3 Kelompok	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani pengolahan tanaman perkebunan (kelapa) yang dibina Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap poktan pelaksana intensifikasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah poktan penangkar benih tanaman pangan yang dibina Jumlah poktan penghasil benih/bibit tanaman hortikultura yang dibina Jumlah poktan pertanian organik yang dibina Jumlah poktan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	1 Poktan 200 Kali 12 Kali 3 Kelompok Tani 7 Laporan 8 Poktan 2 Poktan 8 Poktan 5 Poktan	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan Jumlah alsintan yang diperbaiki Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan Jumlah fasilitas agribisnis tanaman perkebunan yang difasilitasi Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang difasilitasi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah poktan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil	40 Unit 5 Unit 50 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Kelompok 2 Laporan 1 Poktan	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah areal perkebunan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 unit 27 Ha 40 Ha 10 kelompok 2 Kelompok 60 ekor	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara Jumlah pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura Jumlah pemurnian varietas tanaman perkebunan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah sidang pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan	1 Unit 1 Kali 1 Kali 1 VUB 6 ekor 1 Kali	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang diterapkan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	27 Ha 1 Dokumen 10 ekor	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman pangan yang difasilitasi sarana produksi budidaya Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	60 Ha 40 Ha 1 Dokumen 2 kelompok	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran pakan ternak	7.7 %	3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	30 Kelompok Tani	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	100 %	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan yang Beredar	3 jenis	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit HPT	100 %	3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Kelompok Tani		Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif	35,2 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	1 kegiatan	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen		
		Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana	93 %		Pengendalian perda LP2B	1 paket		Pengendalian perda LP2B	1 Paket		
		Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun	5 %				3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		
							Jumlah operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	1 Kegiatan			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah BPP yang di rehabilitasi dan disediakan sarana pendukungnya	17 BPP	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit		
					Jumlah Embung Pertanian yang dibangun/rehabilitasi	1 unit					
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/rehabilitasi	5 KM					
					Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/rehabilitasi	99 unit					
					Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi	2 unit					
							3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17 Unit		
								Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	17 BPP		
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit		
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 unit	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	40 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan kesehatan hewan	500 ekor	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20 Nagari	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahan Endemik (HPR)	17 Kecamatan	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan yang Terkendali	17 Kecamatan	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	20 laporan	3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	200 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	10 laporan					
							3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	50 laporan	3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	50 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	450 laporan					
							3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	450 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerbitan Pra NKV	1 Unit	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	5 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	114 Laporan	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan	400 Ha	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah hama tanaman perkebunan (tupal) yang dikendalikan	5000 ekor	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AUTP Jumlah hama tanaman perkebunan (tupal) yang dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan	1000 Ha 5000 Ekor 400 Ha		
	<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase rekomendasi perizinan pertanian yang ditindaklanjuti/diproses	100 %	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis	5 dokumen	3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen		
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	100 %	3.27.06.2.02.03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	500 ekor	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kelas kelompok tani	34 poktan 0.50 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstatrasi (DAK Non Fisik) Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah petani yang dilatih Persentase peningkatan kelas kelompok tni	204 dokumen 60 orang 50 petani 0.5 %	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan Jumlah program penyuluhan yang tersusun	4 Kategori 17 Unit 60 Orang 10 Posluhnag 18 Dokumen		
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Panas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan Jumlah petani yang dilatih	3 Kategori 17 Kecamatan 34 Unit 2 Kali 50 Petani	Kab. Padang Pariaman	
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstatrasi (DAK Non Fisik) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	204 Dokumen 0 Unit 1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
	<b>3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti (DISDAGNAKERKOP UKM)	100 A 100 % Nilai %	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	95 %	3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terpenuhi	100 %	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91 %	3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	91 %	3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	90 %	3.30.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92 %	3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	94 %	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							3.30.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Jumlah Pasar yang Kondusif	1 Pasar	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		
	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	42 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)	42 %	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17 Kecamatan	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		
	<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	2 Pedagang	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya temu usaha pedagang/produsen lokal dengan pedagang besar, pabrik dan pedagang berorientasi ekspor	2 Pedagang	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha		
	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Pasar tertib ukur	1 Pasar	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (U TPP) bertanda tera sah berlaku	12,9 %	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500 Unit		
	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Terwujudnya pasar BANA	1 Pasar	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah	50 %	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Menggunakan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM		
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											
	<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda	1 Dokumen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Sentra	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		
		Jumlah IKM yang disertifikasi	1 Sentra								
		Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan	1 Sentra								
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		
	<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen		
		Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri	1 Dokumen		Jumlah IKM yang bersertifikat di bidang industri						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen 1 Dokumen	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen 1 Dokumen	3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>											
	<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai Hasil Evaluasi Inspektorat		4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		
							4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan KDH/WKDH	100 persen		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
				Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sandang dan Kesehatan KDH/WKDH	100 persen						
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		
							4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	100 persen		4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83.45 Nilai		4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		
				Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan	12 NILAI						
				Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya	60 PERSEN						
				Persentase perangkat daerah dengan nilai sakiip A ke atas	50 PERSEN						
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan		
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen		
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran	85 persen		4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran	1 Laporan		
				Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik	85 persen						
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		
	<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	2800 nilai	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi	30 persen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi	3 peringkat		4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen		
				Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab.Padang Pariaman	60 persen						
				Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman	10 persen						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen		
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus	90 persen		4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 perda 5 ranperda 40 perbup 400 sk		
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus		
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	85 persen		4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen		
	<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 persen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan		
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman	100 persen		4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen		
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa	97 persen		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	101 Dokumen		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	200 Dokumen		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65 Orang		
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 persen		4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>											
	<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	94 Persentase	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun	6 Dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 0 Orang/bulan 28 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan	0 Dokumen 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah	30 Orang	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jumlah Pengadaan Paket Mebeleur Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 Paket	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah PC, Laptop, Printer, AC, Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	0 Paket 6 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	0 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		
							4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	0 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 orang tenaga administrasi kantor, 1 orang sopir sekwan, 4 orang pramusaji rumah dinas ketua, sespri ketua, ajudan ketua dan sopir ketua, 6 orang Cleaning Service) yg dibayarkan dan jumlah alat pembersih yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya dan Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	0 Unit 12 Bulan	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Frekuensi pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan Jumlah Pakaian Adat Anggota DPRD, Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD, PIN Anggota DPRD yang disediakan	1 Kali/Tahun 14 Bulan 5 Stel	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD yang disediakan	0 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 14 Bulan		
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket		
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang		
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat AKD, Rapat Paripurna, Rapat-rapat Acara tertentu yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	12 Bulan 12 Bulan	4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan		
							4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	0 Paket 12 Bulan		
	<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	82 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	82 %	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Ranperda yang disetujui oleh DPRD, Penyusunan RKT	8 Dokumen 12 Bulan		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi pembahasan APBD Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Frekuensi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Frekuensi Konsultasi Komisi-komisi dan Pendamping yang difasilitasi	1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kali/Tahun 0 Dokumen		
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kali/Tahun 0 Dokumen		
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Frekuensi Pembahasan APBD yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Kali/Tahun 0 Dokumen		
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Kali/Tahun 0 Dokumen		
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Pembahasan Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang disediakan	0 Dokumen 12 Bulan		
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pengawasan penggunaan anggaran, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur, bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan hukum, bidang perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang sumber daya alam, frekuensi konsultasi Banggar DPRD dan Pendamping yang difasilitasi	12 Bulan	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Frekuensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Bulan 0 Dokumen		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Bimtek dan Workshop Anggota DPRD dan Pendamping yang difasilitasi Jumlah Honor Staf Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	6 Kali/Tahun 12 Bulan 12 Bulan	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Frekuensi Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Kali/Tahun 0 Dokumen		
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	0 Dokumen 12 Bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Tenaga Ahli Fraksi yang dibayarkan 12 Bulan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 0 Orang		
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi 3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Frekuensi Kunjungan Kerja Dalam Daerah 3 Kali/Tahun	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 0 Laporan			
						4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses 0 Dokumen	Jumlah Reses Dapil anggota DPRD yang difasilitasi 3 Kali/Tahun			
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD 12 Bulan	12 Bulan	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi 23 Kali/Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 Dokumen			
				Frekuensi Pelaksanaan Tugas Bamus (Rapat Bamus dan Frekuensi Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah 6x) dan Pendamping yang difasilitasi 12 Bulan	12 Bulan						
				Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Komisi/Pansus 6x), ( BK dan Bapemperda 6x), (Konsultasi Anggota DPRD 6x), (Konsultasi Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Propinsi), Kunjungan Kerja DPRD (3x) dan Pendamping AKD yang difasilitasi 27 Kali/Tahun	27 Kali/Tahun						
						4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Frekuensi Rapat Bamus dan Konsultasi Bamus dalam dan Luar daerah 39 Kali/Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0 Dokumen			
						4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD yang disediakan 12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 Dokumen			
<b>5.01 PERENCANAAN</b>											
	<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat A Nilai Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti 100 % Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah 100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	6 Dokumen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26 Orang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang	26 Orang	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan		Kab. Padang Pariaman		
						5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26 Dokumen		Kab. Padang Pariaman		
						5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang	60 Orang	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang		Kab. Padang Pariaman		
						5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1800 Eksemplar 7 Laporan 12 Laporan 200 Paket 6 Paket 200 Paket	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1800 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Paket 2 unit 2 unit	5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		
							5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung 14 Unit 15 Unit	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Indeks kualitas perencanaan	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RJPD/RPJM/RKPD) Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Berita Acara 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPIPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPIPD/RPJM/RKPD)	4 Dokumen		
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	
								5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen			5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	
	<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	93 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Laporan						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Laporan						
								5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	
								5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	
								5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	
								5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	
								5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	
								5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	
								5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen		
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan		
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan		
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Dokumen 5 Laporan 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen		
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan		
<b>5.02 KEUANGAN</b>											
	<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	A A 100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 %		5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30 Nov 2023 tanggal	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen		
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen		
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen		
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen		
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen		
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		
							5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205 Orang		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan		
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen		
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	547 Orang		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 Dokumen		
	<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	100 %				5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
		Persentase BMD yang tertib	100 %				5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	22 Laporan		
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan		
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	556 Laporan		
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang		
	<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD 95 % Persentase Pencapaian Target PAD 100 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak Persentase Penerimaan PAD	1 dokumen 100 %		5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33 Laporan		
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8 Obyek Pajak		
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen		
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2620 Layanan		
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen		
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen		
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dokumen		
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Laporan		
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>											
	<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai Hasil Evaluasi Inspektorat 100 % Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti 100 % Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap. Capkin, Lap. Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	5 Dokumen 5 Dokumen		5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Jumlah Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan )	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, Lap Capkin, Lap Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulanan yang disusun )	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jumlah Laporan Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Selama 14 Bulan	23 Orang 4 Laporan 113 Orang		5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN selama 14 Bulan ( 60 PNS,53 CPNS 2021)	113 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ( Jumlah Honor Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan )	23 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ( Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD )	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu yang Tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terlaksana Jumlah Rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Tagihan Komponen Listrik yang Dibayarkan	600 Dokumen 285 Porsi 5 Paket 400 Laporan 12 Paket		5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ( Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan )	12 paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana )	5 Paket	Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan ( Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan )	600 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ( Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia )	285 Porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang terlaksana )	400 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11 Unit		5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan ( Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor )	11 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, Cetak dan Penggandaan Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan Kantor Jumlah Pelayanan Antar Produk Kepegawaian Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Swakelola Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4 Paket/Lembar 12 Bulan 500 Dokumen 2 Orang 1 Orang 1 Orang 10 Orang 4 Kali		5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, cetak Dan Penggandaan Jumlah pelayanan antar produk Kepegawaian	4 Paket/Lembar 500 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ( Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor )	4 Kali	Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Novice Programmer/It Support Jumlah Pembayaran honor Tenaga Sopir Jumlah Pembayaran honor Tenaga Swakelola umum	12 Bulan 2 Orang 1 orang 1 Orang 10 Orang	Kab. Padang Pariaman	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 Unit		5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ( Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas )	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya )	20 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	0Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang tersiapkan Persentase Peningkatan Terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	73 % 93 % 75 % 92 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Arsip Kepegawaian Kab. Padang Pariaman yang dikelola Jumlah Dokumen dan Data ASN yang di update secara kontinue Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah Kegiatan KORPRI yang terselenggara Jumlah Pengadaan CPNS Jumlah SK Pemberhentian Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK Jumlah Usulan Formasi	6058 ASN 6058 ASN 300 Kartu 2 Kegiatan 300 Orang 220 Dokumen 465 SK	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Jumlah Usulan Formasi)	1 Formasi		
							5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pengadaan CPNS Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK	300 Orang 465 SK	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ( Jumlah SK Pemberhentian ASN )	220 Dokumen		
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi ( Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara )	2 Lembaga		
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ( Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara kontinue )	6058 ASN		
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah arsip kepegawaian kab. padang pariaman yg dikelola Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	6058 ASN 300 Kartu		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan, 50 SK Melepas, 50 SK Menerima) Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan Pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	80 SK 4 Kali 3 Kali 1800 SK 800 SK 500 SK	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana, 150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan, 50 SK Melepas, 50 SK Menerima )	1800 SK		
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional Yang Diterbitkan Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	80 SK 800 SK 500 SK		
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	4 Kali 3 Kali		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Jumlah Pelaksanaan Assessment Center bagi ASN Kab. Padang Pariaman Jumlah SK Penempatan Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PNS Jumlah SK Tubel dan Izin Belajar yang diterbitkan	30 Orang 1 Dokumen 500 SK 50 SK	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya ( Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural )	30 Orang		
							5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center ( Jumlah Pelaksanaan Assessment Center bagi ASN Kab. Padang Pariaman )	1 Dokumen		
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan ( Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan )	50 Orang		
							5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian Jabatan fungsional PNS )	500 Orang		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Jumlah ASN yang Penilaian Kinerjanya secara Online Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP Jumlah Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang tertangani Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Jumlah Pelaksanaan Sidang MPP Jumlah Pembinaan, Perkawinan dan Perceraian ASN yg Dilaksanakan Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan Jumlah Sertifikat Penghargaan Kepada ASN Pensiun	200 Orang 6057 Orang 920 Orang 6057 Orang 5 Lapsan 4 Laporan 4000 PAK 40 Orang 4 Kali 10 Kasus 2 Perbub 220 SK	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi Jumlah produk hukum yang dihasilkan	40 Orang 2 Perbub		
							5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN Jumlah ASN yg penilaian kinerjanya secara online Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan	920 Orang 6057 Orang 4000 PAK		
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP Jumlah Sertifikat Penghargaan kepada ASN pensiun	200 Orang 6057 Orang 220 SK		
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ( Jumlah Laporan Monitoring dan Pembinaan Disiplin ASN )	4 Orang		
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN yg tertangani Jumlah pelaksanaan sidang MPP	5 Laporan 4 Kali		
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah pembinaan perkawinan dan perceraian ASN yang dilaksanakan )	10 Kasus		
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	90 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	30 Orang 1 Dokumen	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen		
							5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi ( Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis)	30 Orang		
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan, Penjurangan Struktural Kepemimpinan Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	26 Orang 43 Orang 60 Orang	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan penjurangan struktural kepemimpinan Jumlah CPNS yg mengikuti diklat prajabatan CPNS Gol II dan III	26 Orang 43 Orang 60 Orang		
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											
	<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Hasil Kajian Kelitbitangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	75 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbitangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbitangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbitangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen		
							5.05.02.2.02.04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen		
							5.05.02.2.02.09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen		
							5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen		
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan 1 Laporan	5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		
							5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>											
	<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti (INSPEKTORAT)	90 A 100 % Nilai %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90 %	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	70 %	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	50 %		6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		
							6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Padang Pariaman	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 %		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Orang	Kab. Padang Pariaman	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90 %		6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	Kab. Padang Pariaman	
	<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase pengawasan yang dilakukan	60 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal	60 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	60 %	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan		
	<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Dilakukan	60 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang dibuat sesuai anggaran	60 %	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	60 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 perangkat daerah			
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah			
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan			
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah			
<b>7.01 KECAMATAN</b>											
	<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	9 dokumen 0Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat, Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Jumlah dik RKA,DPA,RK-P,DPA-P yang disusun Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun Jumlah dok RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Nilai SAKIP Kecamatan Padang Sago Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat Persentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Persentase Keselarasan Dok.Perencana dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	100 persen 5 Dokumen 4 dokumen 4 Dokumen Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan 6 Dokumen BB Nilai A 0 BB Nilai 9 dokumen 10 dokumen 100 % 1 Tahun 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dik RKA, DPA, RK-P, DPA-P yang disusun Jumlah Dik RKA,DPA,RK-P,DPA-P yang di susun Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat Persentase Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat Persentase dokumen Perencanaan yang disusun Persentase Keselarasan Dok.Perencana dan Penganggaran Perangkat Daerah persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah "Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah " Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	9 dokumen 4 Dok 5 dokumen 2 Dokumen 4 dok 1 Dokumen 2 dokumen 4 Dokumen 8 Dokumen 6 dok 6 Dokumen 1 tahun 9 dokumen 10 dokumen 5 Dokumen 1 Tahun 6 Dokumen 100 % 94 % 1 tahun 5 dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	0 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen	Semua Kab/Kota Padang Pariaman	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan SAKIP Jumlah dokumen SAKIP Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 7 dokumen 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 250 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen 1 Laporan	Kab. Padang Pariaman		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok Lap Keuangan, Lap Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD Dok. Laporan Keuangan, Lap. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah orang yang nerima tunjangan Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan Jumlah Pembayaran TPP ASN Kec. Batang Anai Jumlah Terpuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN perentase keselarasan dokumen perencanaan penganggaran perangkat Persentase Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangat daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Terpuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah " Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Tunjangan Kinerja ASN Tunjangan Kinerja ASN	1 Laporan 1 Laporan 12 orang 5 orang/ 12 bulan 1 organisasi 100 % 1 Dokumen 12 orang 1 tahun 1 tahun 100 Persen 1 Tahun 100 % 1 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang menerima honorarium Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 orang/bulan 10 Orang/bulan 11 Orang/bulan 12 Orang/bulan 13 Orang/bulan 18 Orang 9 Orang/Bulan 10 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah makanan & minuman yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penemagan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan & perlengkapan kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase kebutuhan penunjang Perkantoran Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya adminitrasi umum perangkat daerah Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian umum Perangkat daerah Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun 360 exemplar 1800 examplar 1 Tahun 400 orang/tahun 1 tahun 200 buah 200 buah 1 Tahun 350 laporan 1 Laporan 450 kotak 1 Tahun 400 kotak 1 paket 1 paket 6 Unit 3 unit 2 unit 35 buah 55 buah/tahun 1 tahun 50 buah 1 tahun 100 % 1 tahun 100 % 100 % 1 Tahun 12 Paket 100 % 1 Tahun	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket 5 Paket 8 Paket 10 Paket 12 Paket 20 Paket 50 Paket 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket 6 Paket	Kab. Padang Pariaman			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-kordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Orang/Tahun		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Persentase Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Perawatan Kendaraan Dinas Persentase teredianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah Persentase Terpenuhiya Belanja Modal Barang Milik Daerah Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Persetase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100 % 4 buah 3 unit 100 % 1 tahun 1 Paket 1 Tahun 100 % 4 Unit 84 % 84 %	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit 3 Unit 5 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset tetap Lainnya yang terpenuhi	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 4 Unit 6 Unit	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 3 Unit 4 Unit	Kab. Padang Pariaman	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	butuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi Jumlah arsip surat yang diarsipkan jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah jasa pelayanan umum kantor jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga Administrasi dan Kebersihan perkantoran Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Adminstras Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor Persentase terediannya penyediaan jaa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun 1500 arsip 1 tahun 5 orang 1 tahun 12 tagihan/tahun 12 bulan 1 Tahun 1 tahun 12 bulan 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 12 Bulan 4 Orang 6 orang 1 tahun 3 orang/12 bulan 1 tahun 1 Tahun 100 %	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya ATK Kantor	0 Laporan 1 Laporan 1 tahun 12 Laporan 250 Laporan 600 Laporan 950 Laporan 4557 buah/tahun 5000 Laporan 1 Tahun 25 paket	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	1 Laporan 12 Laporan 12 tagihan/tahun 24 Laporan 50 Laporan 1 Tahun 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman		
						7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Laporan 12 Laporan 15 Laporan 20 unit	Kab. Padang Pariaman		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang/Tahun		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan		
								Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT Sopir dan Kebersihan Perkantoran tersedianya jasa pelayanan kantor	6 Orang/Bulan 6 orang		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	
				Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ diperbaiki	1 Gedung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			
				Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Tahun		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			
				Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			
				Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			
				Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit			
				Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			
				jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 tahun						
				jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit						
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit						
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ diperbaiki	25 unit						
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Tahun						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Tahun						
				Persentase Perawatan Kendaraan Dinas	1 tahun						
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun						
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit						
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %						
				Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit						
				Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %						
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %						
						7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Padang Pariaman		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang di peliharad	1 Tahun	Kab. Padang Pariaman		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit			
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Padang Pariaman		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit		Kab. Padang Pariaman	
							7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit		Kab. Padang Pariaman	
	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Tahun Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dgn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 1 laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 % Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk.Kecamatan 1 Tahun Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan 100 % Persentase pelaksanaan pelayanan di kecamatan 100 persen Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan 100 persen Persentase pelaksanaan pelayanan Kecamatan 100 % Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan 1 Tahun Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan 100 %	1 Tahun 1 laporan 100 % 12 Dokumen 100 % 1 Tahun 100 % 100 persen 100 persen 100 persen 100 % 1 Tahun 100 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Tahun jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terbaik 8 kali Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan 9 UKS 20 UKS 15 UKS 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 persen 12 Dokumen 100 % 1 Tahun 100 persen 100 % 100 persen	1 Tahun 1 laporan 8 kali 9 UKS 20 UKS 15 UKS 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 persen 12 Dokumen 100 % 1 Tahun 100 persen 100 % 100 persen	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 3 Laporan 8 Laporan 9 Laporan 19 Laporan 5 Nagari 5	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 Laporan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 19 Laporan Jumlah MTQ, Pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan 5		Kab. Padang Pariaman		
							7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42 Dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 500 Dokumen jumlah surat izin/rekomendasi izinyang diterima 900 surat Jumlah UKS yang dapat dibina 1 Tahun Jumlah UKS yang dapat dibina 2 uks		Kab. Padang Pariaman	
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
							7.01.02.2.02.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan safari ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan 1 Kali Jumlah UKS yang dapat dibina 40 UKS		Kab. Padang Pariaman	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan safari ramadhan, 1 Kali MTQ, Persantren Ramadhan	1 Kali	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah surat izin rekomendasi, 850 surat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Diterima Jumlah surat izin/rekomendasi surat keterangan yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah UKS yang dapat dibina Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Usaha Persentase Koordinasi dan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat Persentase Koordinasi dan terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat Persentase Terlaksananya kegiatan pelayanan di Kecamatan Persentase urusan yang dilimpahkan kepada camat	1 dokumen 1 tahun 5 UKS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 100 % 500 dokumen 1 tahun 100 %	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		Kab. Padang Pariaman	
						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah surat izin, rekomendasi dan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat	0 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 11 Orang/Tahun 12 Laporan 350 Laporan 800 Laporan 900 Laporan 1000 Laporan 1600 Laporan 1 Tahun		Kab. Padang Pariaman	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	0Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 Persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen		Jumlah goro yang dikoordinir oleh kecamatan	12 kali		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kali		
		Jumlah Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	100 %		jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	210 kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		
		jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 tahun		Jumlah pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	13 PKK		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 tahun		
		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	100 %		Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	9 PKK		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 usulan		
		Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	12 usulan		Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	9 PKK		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 usulan		
		Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	1 Tahun		jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 tahun		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 usulan		
		persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	12 Dokumen		jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	210 kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 usulan		
		Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	24 Usulan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Usulan		
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 usulan		
		persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	1 tahun		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 usulan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		
		Persentasi Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %		Persentase koordinasi kegiatan masyarakat desa	12 usulan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Tahun		
					Persentase Koordinasi kegiatan Masyarakat Desa	100 %		Jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	1 Tahun		
					Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	1 Tahun		Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	1 Tahun		
					Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	100 %		jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan	9 usulan		
					Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Paket		
					persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	5 Nagari					
					persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	12 Dokumen					
					persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	100 %					
					Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %					
							7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 tahun		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan		
								Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6 PKK		
								Jumlah pembinaan Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari	9 PKK		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan	1 tahun	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	100 %	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang di monitor ,di evaluasi dan dilaporkan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun		Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		
		Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 kali		Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	1 tahun		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		
		Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	1 tahun		jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor ,dievaluasi dan dilaporkan	1 tahun		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		
		Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100 %		Jumlah koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	12 kali		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		
		Persentase Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal yang Dilaksanakan	100 %		Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	12 kali		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		Jumlah Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 kali		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150 Laporan		
		persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan		Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 kali		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun		persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150 Laporan		
		Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100 %		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
					Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun					
					Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %					
					Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %					
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Nagari	7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Jumlah terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Kali	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	1 kali/tahun	Kab. Padang Pariaman	
		persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum	1 tahun		Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 kali		Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun		
		Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	1 Kali		Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	1 kegiatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang		
		persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 persen		jumlah mtq yang dapat dibina dan difasilitasi	17 kali		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Orang		
		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %		Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	3 kali		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14 Orang		
		persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	100 Persen		Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	4 Kali		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang		
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	5 Orang		persentase semua urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan umum	1 tahun		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang		
		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %		Persentase terelenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	1 Kali		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45 Orang		
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	100 %		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	5 Orang		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	5 Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		
		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	100 %		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	100 %		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 Tahun		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	100 %		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah Kecamatan	1 tahun		Persentase terelenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 tahun		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	40 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1000 Dokumen			
							Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	1 tahun			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			
							Jumlah MTQ, Pendampingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	1 Tahun			
							Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	3 kali/tahun			
							pelaksanaan MTQ Kecamatan	1 paket			
						7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		Kab. Padang Pariaman	
							Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	1 Tahun			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Jumlah pembinaan administrasi nagari Jumlah Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa persentase terbina dan pengawasan pemerintah desa Persentase terbina dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase terbina & pengawasan Pemerintahan Desa persentase terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 100 persen 100 % 100 % 1 tahun 100 % 100 Persen 1 Tahun 12 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa Bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah pembinaan administrasi nagari jumlah pembinaan administrasi nagari jumlah pembinaan administrasi nagari Jumlah pembinaan administrasi nagari jumlah pembinaan bamus nagari jumlah pembinaan bamus nagari Jumlah pembinaan Bamus Nagari Jumlah Pembinaan Keuangan Nagari yang dilaksanakan Jumlah Perna dan diverifikasi Jumlah Perna yang di verifikasi persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 kali 1 kali 1 tahun 1 tahun 3 Nagari 16 kali 8 Nagari 24 kali 8 bamus nagari 8 Nagari 12 Bamus Nagari 1 tahun 18 perna 1 Kali 1 tahun 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Nagari 100 % 100 % 1 Tahun 12 Dokumen 100 % 12 Dokumen	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Perna dan Perwana yang diverifikasi	12 Dokumen 18 dokumen/tahun	Kab. Padang Pariaman	
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah pembinaan administrasi nagari terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen 12 Dokumen 16 Dokumen 120 Dokumen 150 Dokumen 36 kali/tahun 1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		
							7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen		
							7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
	<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	92 persen	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	12 bulan	Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100 persen	8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 persen	8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	100 persen	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang di arsipkan	750 arsip surat	Semua Kab/Kota Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Kab. Padang Pariaman	
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	Kab. Padang Pariaman	
	<b>8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	persentase gangguan keamanan yang dapat di redam	100 persen	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	1 kali	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	persentase laporan pertanggungjawaban parpol tepat waktu	100 persen	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan partai politik yang di verifikasi Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu	10 dokumen  1 kali  1 laporan	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 partai politik 10 Dokumen		
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pemilu	130 Orang  30 orang 100 orang		
	<b>8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100 persen	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	1 kali	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		
	<b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	persentase pelaksanaan penanganan jumlah kasus narkoba menurun	100 persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan keras dan narkoba	1 kali	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		
	<b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100 persen	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	3 kali	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		



## **BAB IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022**

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, berikut rincian Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022**

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>568.407.472.531</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>568.407.472.531</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>568.407.472.531</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>461.847.720.531</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>261.075.000</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.075.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	180.000.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>459.237.919.419</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	458.258.755.769	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	814.163.650	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	165.000.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.910.000</b>	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.910.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>537.098.130</b>	
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	468.000.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.098.130	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.581.733.500</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.933.500	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.486.800.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.984.482</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.991.500	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.992.982	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>106.354.752.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>64.726.591.600</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.075.234.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	774.319.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	850.290.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.830.796.600	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	850.100.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	476.968.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	544.564.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	311.220.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	310.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	270.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	46.663.100.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	125.000.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.505.000.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.000.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	55.000.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>29.802.760.400</b>	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.350.924.000	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	806.207.400	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	986.054.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.400.015.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	885.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	485.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	370.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	310.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.380.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	19.108.300.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	345.380.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.000.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	860.000.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.085.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350.500.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	180.000.000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>9.288.800.000</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	350.000.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	616.000.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	685.000.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	400.000.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	225.000.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.822.800.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	385.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	130.000.000	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	30.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.475.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	140.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2.536.600.000</b>	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	850.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.074.000.000	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	40.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	80.000.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.300.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.300.000	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>135.000.000</b>	
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>90.000.000</b>	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	90.000.000	
<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	45.000.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>70.000.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>70.000.000</b>	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70.000.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>214.684.806.656</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>145.202.851.145</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>142.002.851.145</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>107.774.749.316</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>641.936.195</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.197.900	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	151.042.755	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	82.197.800	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	85.000.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	80.119.980	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.393.980	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.983.780	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>86.581.152.695</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85.648.847.045	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	497.340.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.998.850	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	69.967.550	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	75.000.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	74.999.250	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79.000.000</b>	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.500.000	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.500.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>196.871.365</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.200	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.272.265	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.900	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.600.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>63.212.745</b>	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	39.090.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.122.745	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.748.976.363</b>	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.950.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.150.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.876.363	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.699.953</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.999.953	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.700.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>18.271.900.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.271.900.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>32.953.916.859</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.607.172.274</b>	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	3.436.036.500	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	52.518.500	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.831.711.274	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.100.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	126.906.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.657.165.745</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	321.259.900	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	112.499.900	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.470.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.640.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.008.560	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.749.950	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64.999.800	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	64.999.965	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	60.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	40.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	567.065.440	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	70.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	70.000.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24.956.250	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	44.999.770	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.009.820	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	50.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.500.000.000	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	34.487.500	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	40.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	16.375.521.740	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	546.497.150	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40.000.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>234.578.840</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	70.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	69.999.935	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	94.578.905	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>455.000.000</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	300.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>248.400.000</b>	
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>85.000.000</b>	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	45.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.000.000	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.400.000</b>	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	38.400.000	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>98.777.750</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>61.502.750</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21.502.750	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>37.275.000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	37.275.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>927.007.220</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>759.840.620</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	759.840.620	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>137.166.600</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	137.166.600	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPTD Puskesmas Sungai Geringging</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPTD Puskesmas Koto Bangko</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPTD Puskesmas Batu Basa</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPTD Puskesmas Ampalu</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPTD Puskesmas Sungai Limau</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>UPTD Puskesmas Kampung Dalam</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>UPTD Puskesmas Sikukur</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>UPTD Puskesmas Ulakan</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>UPTD Puskesmas Padang Alai</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Puskesmas Pauh Kamar	110.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD Puskesmas Gasan Gadang	90.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD Puskesmas Sungai Sariak	110.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD Puskesmas Kayu Tanam	110.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD Puskesmas Padang Sago	90.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPT Puskesmas Sikabu	90.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	UPTD Puskesmas Lubuk Alung	110.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	UPTD Puskesmas Enam Lingsung	90.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	UPTD Puskesmas Kampung Guci	90.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0019</b>	<b>UPTD Puskesmas Anduring</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0020</b>	<b>UPTD Puskesmas Sintuk</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0021</b>	<b>UPTD Puskesmas Kataping</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0022</b>	<b>UPTD Puskesmas Limau Purut</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0023</b>	<b>UPTD Puskesmas Sicincin</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0024</b>	<b>UPTD Puskesmas Pasar Usang</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0025</b>	<b>UPTD Puskesmas Patamuan</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	90.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0026</b>	<b>UPTD LABKESDA</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>375.000.000</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0027	<b>UPTD IFK</b>	<b>375.000.000</b>	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>375.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>375.000.000</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.000.000	
1.02.1.02.0.00.01.0000	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<b>69.481.955.511</b>	
1.02.1.02.0.00.01.0000	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<b>69.481.955.511</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.214.349.451</b>	
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.214.349.451</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.214.349.451	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>44.267.606.060</b>	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.529.880.000</b>	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	5.000.000.000	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	500.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.029.880.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.000.000.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.737.726.060</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	30.737.726.060	
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>319.668.202.548</b>	
1.03.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>319.668.202.548</b>	
1.03.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>319.668.202.548</b>	
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.502.846.851</b>	
1.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>512.169.970</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.150.000	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.970.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.367.270	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.175.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.206.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.223.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.078.700	
1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.709.366.986</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.022.184.526	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	641.680.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.502.460	
1.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>164.743.000</b>	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.368.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.375.000	
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>701.320.035</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.315.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.766.535	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	114.877.500	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.361.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.064.050.350</b>	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	845.950.350	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.100.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.804.965.600</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.480.600	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.785.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.750.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.392.950.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.546.230.910</b>	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.450.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.020.112.750	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.668.160	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>47.995.211.090</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.487.578.000</b>	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	16.487.578.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.507.633.090</b>	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	21.583.190.880	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.443.622.210	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.480.820.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>3.651.177.200</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.651.177.200</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300.756.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.350.421.200	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.395.669.400</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.395.669.400</b>	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	439.049.200	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.956.620.200	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>3.372.925.540</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.372.925.540</b>	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.424.719.240	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	948.206.300	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>51.565.574.240</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>51.565.574.240</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.289.712.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	50.275.862.240	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>190.681.327.299</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>190.681.327.299</b>	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	610.330.500	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	128.972.005.299	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	47.944.748.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.496.493.500	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7.375.625.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	4.282.125.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>2.503.470.928</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>1.199.824.280</b>	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	999.824.280	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	200.000.000	
<b>1.03.12.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>951.572.928</b>	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	951.572.928	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>152.076.400</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25.050.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	127.026.400	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>199.997.320</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	199.997.320	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.677.600.000</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>2.677.600.000</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>2.677.600.000</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>480.000.000</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.000.000	
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>400.000.000</b>	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400.000.000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.047.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>325.000.000</b>	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	325.000.000	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>1.722.600.000</b>	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.270.000.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	452.600.000	
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>100.000.000</b>	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	100.000.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>18.078.709.479</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>11.796.428.245</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>11.796.428.245</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.841.569.605</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>103.341.500</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.696.750	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.644.750	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.277.714.607</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.179.914.607	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.800.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>217.595.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	194.995.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.640.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>321.966.000</b>	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.966.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.878.700</b>	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.440.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.438.700	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.653.688.498</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.065.700	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.579.622.798	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>190.385.300</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.489.050	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.100.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.796.250	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>545.536.860</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>333.153.110</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	75.545.500	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	92.409.510	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.969.950	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	95.195.400	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.032.750	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>129.473.750</b>	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52.663.750	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	76.810.000	
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>82.910.000</b>	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	82.910.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>409.321.780</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>389.351.780</b>	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.998.810	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	249.352.970	
<b>1.05.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>19.970.000</b>	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	19.970.000	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>6.282.281.234</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>6.282.281.234</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.458.790.834</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.249.135</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.500.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.749.135	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.038.816.779</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.216.779	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.600.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>74.999.780</b>	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.999.780	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>380.404.000</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.404.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.750.000</b>	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	37.750.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.633.125.980</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.949.340	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.880.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.327.296.640	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213.445.160</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.697.700	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.493.150	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.849.950	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.404.360	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.823.490.400</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>53.708.900</b>	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	53.708.900	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>776.344.250</b>	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	145.399.850	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	223.792.900	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	11.435.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	370.466.500	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.250.000	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>664.509.250</b>	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	536.023.750	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	128.485.500	
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>328.928.000</b>	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.005.000	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	74.000.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	235.923.000	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>6.135.181.014</b>	
<b>1.06.2.08.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.135.181.014</b>	
<b>1.06.2.08.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.135.181.014</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.832.699.818</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>81.000.500</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.130.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.870.500	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.612.577.879</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.479.017.879	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133.560.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>119.665.100</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.685.500	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.775.600	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.700.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.204.000	
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>92.909.925</b>	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.909.925	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>719.170.164</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.232.964	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.010.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.927.200	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>207.376.250</b>	
1.06.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	155.896.250	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.480.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>277.793.120</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>277.793.120</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	129.998.400	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.490.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	78.979.050	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39.370.900	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.954.770	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>436.330.456</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>365.787.906</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	178.970.500	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	101.723.500	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	32.774.750	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.820.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	32.935.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.564.156	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>70.542.550</b>	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	70.542.550	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>335.978.730</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>335.978.730</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228.988.750	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	106.989.980	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>243.554.990</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>189.399.235</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	83.862.100	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	28.231.600	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	77.305.535	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>54.155.755</b>	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	54.155.755	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>8.823.900</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>8.823.900</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.823.900	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>667.216.052</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>667.216.052</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>667.216.052</b>	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>25.000.000</b>	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	25.000.000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>268.799.670</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>238.799.670</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	238.799.670	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>30.000.000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>184.399.600</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.999.950</b>	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	39.999.950	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>59.399.650</b>	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	59.399.650	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>85.000.000</b>	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	85.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>189.016.782</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>109.018.362</b>	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	81.077.213	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	27.941.149	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.998.420</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.420.084	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	46.578.336	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>560.413.190</b>	
<b>1.06.2.08.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>560.413.190</b>	
<b>1.06.2.08.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>560.413.190</b>	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>236.983.220</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>105.177.000</b>	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.177.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>131.806.220</b>	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.806.220	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>26.945.000</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.945.000</b>	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.945.000	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>133.729.850</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>133.729.850</b>	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	133.729.850	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>39.000.000</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.000.000</b>	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	39.000.000	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>75.005.000</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>75.005.000</b>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.005.000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>48.750.120</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.750.120</b>	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.750.120	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>801.998.590</b>	
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>801.998.590</b>	
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>801.998.590</b>	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>741.999.010</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>69.999.010</b>	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	39.999.010	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	20.000.000	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>572.000.000</b>	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	560.000.000	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>19.999.730</b>	
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>19.999.730</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.999.730	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>39.999.850</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.999.850</b>	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>13.130.000.000</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>13.130.000.000</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>13.130.000.000</b>	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>13.000.000.000</b>	
<b>2.10.05.2.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.000.000.000</b>	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000.000	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>100.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.534.971.878</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>10.534.971.878</b>	
<b>1.04.2.10.2.11.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>	<b>10.534.971.878</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.169.971.880</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.000.000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.889.958.057</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.889.958.057	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190.553.407</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.553.407	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.950.960.416</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.856.896	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.848.103.520	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.500.000</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.400.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.100.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>250.000.000</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.594.999.998</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>215.000.000</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	80.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65.000.000	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1.379.999.998</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.379.999.998	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>10.000.000</b>	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>165.000.000</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>165.000.000</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	60.000.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	50.000.000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.000.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.115.000.000</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>2.115.000.000</b>	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20.000.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.695.000.000	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.369.523.439</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.369.523.439</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.369.523.439</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.662.573.325</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69.270.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.970.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.300.000	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.802.905.288</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.905.288	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.000.000	
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.280.000</b>	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.280.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.069.900.000</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	776.800.000	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.600.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.800.000	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>309.031.037</b>	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.000.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.031.037	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.175.612.000</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.000.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.200.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.412.000	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>184.575.000</b>	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.445.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.130.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>181.410.000</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>61.780.000</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.700.000	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	7.700.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13.800.000	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.830.000	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	9.750.000	
<b>2.12.02.2.02</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>14.100.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	14.100.000	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>79.800.000</b>	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7.300.000	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	38.900.000	
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	8.600.000	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000	
<b>2.12.02.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>25.730.000</b>	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	11.405.000	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	14.325.000	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>195.505.000</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>94.400.000</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.900.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	70.000.000	
2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	14.500.000	
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>63.950.000</b>	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	8.100.000	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	9.900.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	18.100.000	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	9.400.000	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	18.450.000	
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>37.155.000</b>	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	16.500.000	
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	11.555.000	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	9.100.000	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>299.525.000</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>9.480.000</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.480.000	
<b>2.12.04.2.02</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>4.650.000</b>	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.650.000	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>87.485.000</b>	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.640.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.250.000	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.595.000	
<b>2.12.04.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>197.910.000</b>	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.940.000	
2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	4.720.000	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	175.250.000	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>30.510.114</b>	
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>30.510.114</b>	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9.000.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	21.510.114	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.988.667.341</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.988.667.341</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.988.667.341</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.209.674.901</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.422.873.176</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.322.913.176	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.960.000	
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4.950.000</b>	
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>194.852.750</b>	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.860.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.992.750	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.918.225</b>	
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.918.225	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>415.600.000</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.600.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.480.750</b>	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.990.750	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.490.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>70.000.000</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>70.000.000</b>	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	20.000.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	20.000.000	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	30.000.000	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>20.000.000</b>	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>510.000.000</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>510.000.000</b>	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	30.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20.000.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	70.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	170.000.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.000.000	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.178.992.440</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.178.992.440</b>	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	14.992.105	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.000.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.074.000.335	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>11.818.060.111</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>11.818.060.111</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>11.818.060.111</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.384.560.711</b>	
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>84.500.000</b>	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.750.000	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.250.000	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.500.000	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.750.000	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.500.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.750.000	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.641.783.390</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.783.390	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.000.000	
<b>2.14.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.980.000</b>	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.980.000	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.600.808</b>	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.740.808	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.500.000	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.860.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.500.000	
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.490.000</b>	
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.490.000	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>360.587.615</b>	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.644.815	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.800.000	
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.620.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.522.800	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.618.898</b>	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.432.250	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.186.648	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>178.345.000</b>	
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>62.750.000</b>	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	17.500.000	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	12.500.000	
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	11.500.000	
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	11.750.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	9.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.595.000</b>	
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	15.250.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.995.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.350.000	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.327.574.400</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.263.215.000</b>	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	38.500.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	265.200.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	833.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	51.500.000	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>517.150.000</b>	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	11.500.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	505.650.000	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.112.209.400</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	966.539.400	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12.500.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.055.670.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.450.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10.500.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.500.000	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.250.000	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>435.000.000</b>	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.500.000	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	11.250.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	362.250.000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	25.000.000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.927.580.000</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.927.580.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	9.500.000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.250.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.841.330.000	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.750.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.750.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40.000.000	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>19.343.045.081</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>19.343.045.081</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>19.343.045.081</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.464.906.891</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>233.058.065</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.644.776	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.413.289	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.774.530.186</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.563.644.771	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.040.000	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.845.415	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.000.000	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>64.940.000</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.000.000	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.940.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>148.597.000</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.597.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>132.461.740</b>	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.124.360	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.337.380	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.860.924.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.280.500	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.350.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.676.294.400	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>250.395.000</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.395.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>13.818.138.190</b>	
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>103.199.900</b>	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	103.199.900	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>10.874.471.690</b>	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.169.769.720	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.549.762.580	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	154.939.390	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.729.306.600</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.679.306.600	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>26.160.000</b>	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7.070.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	19.090.000	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	20.000.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.000.000	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>50.000.000</b>	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.000.000	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	
<b>2.15.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.15.05.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>45.000.000</b>	
2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	45.000.000	
<b>2.15.05.2.03</b>	<b>Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000.000</b>	
2.15.05.2.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7.687.452.080</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7.687.452.080</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7.687.452.080</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.224.006.807</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>104.875.000</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.150.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.725.000	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.835.188.237</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.388.237	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.800.000	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.180.400</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.006.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.490.400	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.495.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.689.000	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.932.170</b>	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.880.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.052.170	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>953.163.800</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.364.760	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.799.040	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.667.200</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.037.200	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.140.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.490.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>888.201.650</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>888.201.650</b>	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	54.393.500	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	54.513.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	139.357.200	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	639.937.950	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.575.243.623</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.954.188.146</b>	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.954.188.146	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>621.055.477</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.878.350	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	262.388.217	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	23.847.500	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	32.171.810	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	209.954.660	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	63.814.940	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>4.917.034.100</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>4.917.034.100</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>4.917.034.100</b>	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>85.000.000</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>76.999.800</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76.999.800</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.999.800	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>2.480.699.750</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.480.699.750</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.480.699.750	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>143.000.000</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>143.000.000</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	48.000.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	45.000.000	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>2.096.334.550</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>2.096.334.550</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.096.334.550	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.596.349.119</b>	
<b>2.18.3.31.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.596.349.119</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.18.3.31.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.596.349.119</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.877.960.029</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.464.250</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.684.250	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.780.000	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.365.416.979</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.416.979	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>112.940.000</b>	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.100.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.840.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>542.446.970</b>	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.409.970	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.150.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.877.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.550.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.079.000	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.381.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>468.730.780</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.060.160	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.135.500	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.535.120	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>295.961.050</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.329.350	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.551.700	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.080.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>81.180.000</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.180.000</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	11.180.000	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000</b>	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.000.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	15.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>173.563.840</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>173.563.840</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.968.590	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.999.500	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	8.595.750	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>393.394.000</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>393.394.000</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.300.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	248.494.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>35.251.250</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.251.250</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.251.250	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>5.077.200.000</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>5.077.200.000</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>5.077.200.000</b>	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.350.000.000</b>	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	140.000.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	165.000.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	200.000.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	295.000.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	450.000.000	
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3.577.200.000</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.842.200.000</b>	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.742.200.000	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>895.000.000</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	110.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	660.000.000	
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>80.000.000</b>	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	60.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	20.000.000	
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>700.000.000</b>	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	700.000.000	
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>60.000.000</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	20.000.000	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	20.000.000	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	20.000.000	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>28.600.000</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>28.600.000</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>28.600.000</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>28.600.000</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.600.000</b>	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	28.600.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>40.830.910</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>40.830.910</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>40.830.910</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>40.830.910</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.830.910</b>	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.830.910	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>2.833.875.000</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.833.875.000</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.833.875.000</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.160.000.000</b>	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.295.000.000</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	215.000.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.080.000.000	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>865.000.000</b>	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	865.000.000	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>370.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>370.000.000</b>	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	370.000.000	
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>80.000.000</b>	
<b>2.22.04.2.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	80.000.000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>223.875.000</b>	
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	50.000.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000	
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>73.875.000</b>	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	73.875.000	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>240.000.800</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>240.000.800</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>240.000.800</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>202.130.800</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>123.245.800</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	30.000.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.785.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	23.941.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	35.000.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.519.800	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>78.885.000</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	21.585.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	27.300.000	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>37.870.000</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.870.000</b>	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	19.000.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	18.870.000	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>4.899.118.146</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>4.899.118.146</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>4.899.118.146</b>	
<b>2.24.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.643.452.776</b>	
<b>2.24.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>75.275.250</b>	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.658.750	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.616.500	
<b>2.24.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.451.193.186</b>	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.344.168.186	
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.300.000	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.725.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.24.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.850.000</b>	
2.24.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.850.000	
<b>2.24.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>187.510.000</b>	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.010.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
<b>2.24.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.931.470</b>	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.998.630	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.932.840	
<b>2.24.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.670.692.870</b>	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.629.370	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.981.500	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.538.082.000	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>129.760.000</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.110.000</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	27.660.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27.450.000	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.450.000</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25.450.000	
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>24.200.000</b>	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	24.200.000	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>103.405.370</b>	
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>27.065.000</b>	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	27.065.000	
<b>2.24.03.2.03</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>27.110.370</b>	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	27.110.370	
<b>2.24.03.2.04</b>	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>49.230.000</b>	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	24.230.000	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25.000.000	
<b>2.24.04</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>22.500.000</b>	
<b>2.24.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>22.500.000</b>	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	22.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>9.262.922.629</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>9.262.922.629</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>9.262.922.629</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.924.830.374</b>	
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.799.880</b>	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.000.000	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.500.000	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.500.000	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.500.000	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.500.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.799.880	
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.812.602.364</b>	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.690.114	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.260.000	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.652.250	
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>227.043.800</b>	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.800	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.544.000	
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>85.000.000</b>	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	85.000.000	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>568.470.880</b>	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.380.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.890.880	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.913.450</b>	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.944.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.969.450	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>2.981.690.400</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.901.690.400</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.665.040.400	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.236.650.000	
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.000.000</b>	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25.000.000	
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>25.000.000</b>	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	25.000.000	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.119.401.855</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>679.999.960</b>	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	620.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	59.999.960	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.439.401.895</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.079.402.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.999.965	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.999.930	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>97.000.000</b>	
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>97.000.000</b>	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	75.000.000	
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	22.000.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>140.000.000</b>	
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>30.000.000</b>	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>60.000.000</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.000.000	
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>8.582.230.427</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>8.582.230.427</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>8.582.230.427</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.278.035.577</b>	
<b>3.26.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>102.331.770</b>	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.170.760	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.161.010	
<b>3.26.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.139.738.186</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.035.978.186	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.760.000	
<b>3.26.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.660.000</b>	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.660.000	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225.313.350</b>	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.423.100	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.184.250	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.216.000	
<b>3.26.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>97.760.000</b>	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000	
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.880.000	
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.880.000	
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>522.700.770</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.998.270	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.102.500	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.600.000	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178.531.501</b>	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.571.501	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.200.000	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.830.000	
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>2.500.000.000</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>431.500.000</b>	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	401.500.000	
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.383.500.000</b>	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.300.000.000	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	83.500.000	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>665.000.000</b>	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	665.000.000	
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	10.000.000	
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	10.000.000	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>419.999.850</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>419.999.850</b>	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	370.000.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	49.999.850	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>3.26.04.2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>200.000.000</b>	
3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	200.000.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1.184.195.000</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>814.195.000</b>	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	599.195.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150.000.000	
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	65.000.000	
<b>3.26.05.2.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>370.000.000</b>	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	370.000.000	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>36.012.047.518</b>	
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN</b>	<b>25.752.947.135</b>	
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN</b>	<b>25.752.947.135</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.734.586.295</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.068.940</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.544.870	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.524.070	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.073.174.175</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.928.066.425	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.120.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.987.750	
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>156.129.000</b>	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.140.000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.989.000	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>364.679.260</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.838.000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.474.760	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.928.500	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.238.000	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>140.194.250</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.594.250	
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.600.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>762.507.420</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.836.220	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.920.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.751.200	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.833.250</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.833.250	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>4.413.739.250</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>2.689.378.050</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	150.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.539.378.050	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.724.361.200</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	150.000.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.474.361.200	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>8.683.308.730</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>112.036.940</b>	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	27.035.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	85.001.940	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>8.571.271.790</b>	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6.521.252.000	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	150.020.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.350.000.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	249.999.790	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	300.000.000	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>204.522.840</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>204.522.840</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	204.522.840	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>8.502.500</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.502.500</b>	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	8.502.500	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>708.287.520</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>708.287.520</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	152.559.520	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	235.028.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	320.700.000	
<b>3.27.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>10.259.100.383</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>10.259.100.383</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.970.325.769</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>79.999.580</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.999.740	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.999.840	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.112.858.372</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.967.163.582	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.220.000	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.474.790	
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>115.880.000</b>	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.880.000	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>171.563.777</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.950.027	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.363.500	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.865.250	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.380.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.405.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>397.470.090</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.503.130	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.020.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.546.960	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.553.950</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.553.950	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>4.030.007.839</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>503.403.971</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	393.875.450	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	109.528.521	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>3.281.530.038</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2.340.000.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	260.990.040	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	680.539.998	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.500.000	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144.984.280</b>	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	26.984.890	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	117.999.390	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>77.589.550</b>	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	77.589.550	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>798.862.000</b>	
<b>3.27.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>798.862.000</b>	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	798.862.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>253.026.525</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.874.825</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	32.875.000	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.999.825	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	75.000.000	
<b>3.27.04.2.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.230.980</b>	
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	20.400.000	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	9.830.980	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.529.190</b>	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	8.529.190	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>30.391.530</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	17.957.630	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12.433.900	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>56.878.250</b>	
<b>3.27.06.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>	<b>56.878.250</b>	
3.27.06.2.02.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	56.878.250	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>150.000.000</b>	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>7.174.987.149</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>7.174.987.149</b>	
<b>2.17.3.30.2.07.13.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>7.174.987.149</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.136.996.914</b>	
<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>95.000.000</b>	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	
<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.002.649.193</b>	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.853.821.493	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.835.200	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.992.500	
<b>3.30.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.939.000</b>	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.939.000	
<b>3.30.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.585.694</b>	
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.585.694	
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>594.221.890</b>	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.995.310	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.226.580	
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.601.137</b>	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.996.800	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.317.500	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.286.837	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>549.997.925</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>399.999.840</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	399.999.840	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>149.998.085</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	149.998.085	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>117.999.880</b>	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>57.999.910</b>	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	57.999.910	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.999.970</b>	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	59.999.970	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>69.992.615</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>69.992.615</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	69.992.615	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>199.999.865</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>199.999.865</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	199.999.865	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>99.999.950</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>99.999.950</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	99.999.950	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>17.253.857.000</b>	
<b>2.18.3.31.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>17.253.857.000</b>	
<b>2.18.3.31.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>17.253.857.000</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>17.243.857.000</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>17.243.857.000</b>	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.000.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50.000.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	17.188.857.000	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.000.000	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5.000.000	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>39.981.697.719</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>39.981.697.719</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>39.981.697.719</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>34.005.697.209</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>132.724.092</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.220.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.500.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.002.342	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.002.150	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.999.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.800	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.780.986.350</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.347.926.720	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	385.560.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.499.850	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.999.780	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>309.840.650</b>	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.850.000	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	114.994.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	119.996.650	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.148.203.980</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.900.980	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.943.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	174.975.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	375.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.385.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.145.892.570</b>	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.996.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.916.350	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.976.220	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.854.476.020</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.993.220	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	669.950.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.999.532.800	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>934.112.100</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	800.116.800	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	14.500.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.800.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.695.300	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>681.956.517</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	616.956.517	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.000.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.099.999.800</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	659.999.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	440.000.000	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>442.505.130</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	79.998.330	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	175.011.925	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	82.500.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	29.994.875	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	75.000.000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>475.000.000</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	225.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200.000.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50.000.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>5.201.000.820</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>255.000.000</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	50.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	40.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	165.000.000	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>4.526.000.820</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.326.000.820	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>385.000.000</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	75.000.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	250.000.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	60.000.000	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>35.000.000</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35.000.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>774.999.690</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>154.999.890</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	55.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	59.999.890	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40.000.000	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>175.000.000</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	65.000.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60.000.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>399.999.800</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	229.999.800	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	85.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.000.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>45.000.000</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.000.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	15.000.000	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>41.899.960.614</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>41.899.960.614</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>41.899.960.614</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.691.969.969</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>97.397.400</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.014.400	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.383.000	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.733.737.892</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.528.457.892	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.280.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>245.545.900</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.864.900	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	55.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.681.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.200.560.000</b>	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.560.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.359.652.470</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.996.680	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.900.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.107.755.790	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>403.010.950</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.280.500	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.980.450	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.750.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>17.227.126.157</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.651.501.157	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	450.660.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	124.965.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.349.939.200</b>	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	759.787.950	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	590.151.250	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>17.207.990.645</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>410.515.000</b>	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	410.515.000	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>1.015.554.470</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	234.999.840	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	235.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	234.999.740	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	234.999.900	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	75.554.990	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>1.541.850.150</b>	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.541.850.150	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.235.663.800</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.705.264.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	249.999.800	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	280.400.000	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>769.999.695</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	49.999.770	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	719.999.925	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.234.407.530</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.999.999.600	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.133.099.930	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.101.308.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.524.929.891</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>6.524.929.891</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>6.524.929.891</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.837.883.811</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.874.250</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.322.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.552.250	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.969.194.248</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.848.614.898	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.920.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.659.350	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>102.180.000</b>	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.780.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.400.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>337.560.075</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.654.075	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.306.000	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>196.535.000</b>	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.285.000	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	95.950.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.300.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>973.459.354</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.410.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.800.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.049.354	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.200.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.080.884</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.810.404	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.620.480	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.650.000	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.134.074.305</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>969.288.265</b>	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	49.999.500	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	49.999.800	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	79.999.950	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	79.999.665	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	709.289.350	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>94.795.290</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44.241.640	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.553.650	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>69.990.750</b>	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.990.750	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>552.971.775</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>251.984.250</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.994.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.996.670	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.998.400	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	21.995.200	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.230	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29.999.950	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29.999.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>129.999.370</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.999.370	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>170.988.155</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.988.670	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	32.999.785	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.999.950	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	32.999.750	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>191.999.571.838</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>191.999.571.838</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>191.999.571.838</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.896.246.218</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>147.328.040</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.798.940	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.729.100	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.800.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.011.987.326</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.860.827.396	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.159.930	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>31.350.000</b>	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.350.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.151.200</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.082.000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.793.200	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.760.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.516.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28.447.085</b>	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.447.085	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.332.935.720</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.600	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.800.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.077.135.120	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.046.847</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.158.127	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.998.720	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.890.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>180.607.748.330</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>734.348.000</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	50.000.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	32.909.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24.758.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	321.926.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54.755.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>339.050.000</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60.550.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	32.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	21.800.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31.000.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	30.000.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.000.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	24.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	27.000.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	27.200.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	62.500.000	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>398.681.230</b>	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	47.071.350	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.905.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	64.577.250	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	17.999.710	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	74.195.050	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	94.932.870	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>179.064.170.600</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	166.691.793.100	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.524.977.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.847.400.500	
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>71.498.500</b>	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	71.498.500	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>888.208.630</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>888.208.630</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	44.493.060	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	21.343.800	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	567.100.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	56.712.500	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56.825.010	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49.683.260	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	92.051.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>607.368.660</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>607.368.660</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	11.113.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	38.645.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25.000.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60.435.250	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.035.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	79.500.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.000.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	33.000.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	243.890.410	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.000.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.750.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5.000.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>16.387.190.745</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>16.387.190.745</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>16.387.190.745</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.799.145.886</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>135.992.360</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.369.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.622.860	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.022.166.946</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.878.341.946	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.880.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.945.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.374.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.814.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.560.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.651.020</b>	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.651.020	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>368.372.810</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.690.780	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.940.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.742.030	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.588.750</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.588.750	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.588.044.859</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>879.095.720</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	52.620.230	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	694.251.460	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.952.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	16.416.030	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	62.040.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.816.000	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>273.129.890</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	35.155.890	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	81.094.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	156.880.000	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>217.880.380</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	110.825.500	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	76.125.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.249.880	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	20.680.000	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>217.938.869</b>	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.118.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	94.722.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	24.816.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	20.499.360	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.483.689	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.299.820	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>1.131.451.737</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.131.451.737</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.131.451.737</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.131.451.737</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>258.839.190</b>	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	135.745.440	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	123.093.750	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>872.612.547</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	872.612.547	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>358.433.505</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>358.433.505</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>358.433.505</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>358.433.505</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>29.966.995</b>	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	29.966.995	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>134.976.130</b>	
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29.976.250	
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	34.999.890	
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	35.000.000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	34.999.990	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>64.975.000</b>	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	64.975.000	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>128.515.380</b>	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	78.750.570	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	49.764.810	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.094.449.315</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.094.449.315</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.094.449.315</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.817.890.465</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78.268.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.268.000	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.127.841.264</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.042.761.264	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.080.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>182.244.000</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.250.000	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.497.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.497.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>330.454.750</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.950.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.250.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.504.750	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.250.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.500.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>392.570.351</b>	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.000.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	118.950.000	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.325.750	
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.294.601	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>340.014.500</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.499.940	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.514.560	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.497.600</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.747.600	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.450.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.690.000	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.610.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>914.370.000</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>713.970.000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	127.950.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62.510.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	56.935.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	64.925.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	78.450.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	215.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	108.200.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>200.400.000</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.500.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	165.900.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>362.188.850</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>73.909.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.000.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	33.909.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>288.279.850</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43.279.850	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90.000.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.000.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>12.503.970.386</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG</b>	<b>740.223.237</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG</b>	<b>740.223.237</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>683.428.237</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.460.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.820.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>419.288.465</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	384.728.465	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.420.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.420.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>38.044.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.255.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.805.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.984.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32.657.332</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.657.332	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>143.943.440</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.876.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.267.440	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.615.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.285.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.540.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.840.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.840.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.660.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.660.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>32.015.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>32.015.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.030.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.985.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.220.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7.220.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.420.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.800.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.060.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>12.060.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.020.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.020.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.020.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM</b>	<b>690.087.447</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM</b>	<b>690.087.447</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>616.302.397</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.536.190</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.536.190	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>298.666.462</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	254.021.462	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.085.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.037.500</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.037.500	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>78.838.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.590.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.893.725</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.893.725	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.217.220</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.118.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.090.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.209.120	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.112.800</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.850.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.262.800	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>26.042.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.736.250</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.736.250	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.306.250</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.306.250	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.398.800</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.398.800</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.393.800	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.005.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.990.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.990.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.990.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>5.730.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>5.730.000</b>	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5.730.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.623.750</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.623.750</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.623.750	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN</b>	<b>715.260.742</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN</b>	<b>715.260.742</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>649.960.742</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.100.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>376.008.995</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	345.768.995	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.240.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>57.632.227</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.375.227	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.625.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.832.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.500.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.609.520</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.580.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.750.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.279.520	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.110.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.110.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3.650.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2.650.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.650.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13.150.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>13.150.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.100.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.050.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.500.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.500.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	41.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI</b>	<b>845.436.971</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI</b>	<b>845.436.971</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>737.926.731</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.505.500</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.426.100	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.079.400	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>446.657.581</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	412.097.581	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.380.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.900.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.480.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>106.999.010</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.322.310	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.338.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.388.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.180.640</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.230.720	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.149.920	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.204.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.284.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.920.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>24.865.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>16.730.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.200.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.530.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8.135.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.135.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.760.240</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.760.240</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.398.240	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.362.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.210.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.210.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.200.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.010.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18.785.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>18.785.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.345.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.440.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>15.890.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>15.890.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.890.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG</b>	<b>717.170.587</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG</b>	<b>717.170.587</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>656.051.587</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.500.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>399.851.587</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	364.671.587	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.680.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79.916.770</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.831.770	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.011.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.074.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.981.230</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.598.750	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.490.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.892.480	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.802.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.802.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>20.250.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.250.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.250.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.000.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.869.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.869.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.890.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.979.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG</b>	<b>766.626.338</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG</b>	<b>766.626.338</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>702.589.888</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.500.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>362.764.538</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	325.324.538	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.440.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60.629.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.650.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.880.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.262.510</b>	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	34.262.510	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.239.190</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.039.190	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.193.750</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.162.250	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.821.500	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>16.375.750</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.715.750</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.215.750	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.500.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>6.660.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.660.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>26.148.100</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>26.148.100</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.687.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.460.600	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.682.600</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.682.600</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.682.600	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>16.382.500</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>16.382.500</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.382.500	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.447.500</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.447.500</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.447.500	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG</b>	<b>846.210.026</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG</b>	<b>846.210.026</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>775.010.026</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.550.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.550.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>435.363.495</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	400.683.495	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.760.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.920.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.960.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.960.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.112.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.415.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.698.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.266.255</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.666.255	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.600.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>123.659.026</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.559.026	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.099.250</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.999.250	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.100.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>12.960.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.960.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.960.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>32.500.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>32.500.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11.160.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>11.160.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.160.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.580.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.580.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.560.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.020.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS</b>	<b>655.544.838</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS</b>	<b>655.544.838</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>566.888.982</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>319.232.457</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	281.672.457	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.259.600</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.994.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.465.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.616.675</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.450.275	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.010.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.156.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.780.250</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.780.250	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>47.209.506</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>42.209.506</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.412.006	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.797.500	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>28.146.350</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>28.146.350</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.950.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.196.350	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.300.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.300.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.300.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO</b>	<b>615.201.833</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO</b>	<b>615.201.833</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>579.566.833</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.300.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.380.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.920.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>361.650.918</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	311.050.918	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.380.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.220.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>45.080.000</b>	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.488.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.592.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.509.845</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.509.845	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113.851.070</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.120.230	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.835.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.920.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.975.840	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.175.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.175.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>12.985.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>12.985.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.895.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.500.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.500.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>17.650.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>17.650.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.040.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.600.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.010.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.500.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN</b>	<b>695.580.337</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN</b>	<b>695.580.337</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>665.750.337</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.400.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>419.945.537</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	381.825.537	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.120.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.055.000</b>	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.215.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.840.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.607.300</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.418.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.388.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.742.500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.202.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.540.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.540.000</b>	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2.540.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.540.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13.160.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>13.160.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.240.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.920.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.540.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.540.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.540.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.050.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.050.000</b>	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9.050.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.540.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.540.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.540.000	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING</b>	<b>786.362.957</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING</b>	<b>786.362.957</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>705.536.127</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.301.250</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.462.250	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.839.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>396.196.953</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	358.806.953	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.390.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.770.000</b>	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.770.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>73.344.750</b>	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.935.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.797.750	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.612.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.685.374</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.685.374	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>119.541.800</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.061.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.380.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.400.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.696.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.551.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.665.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.480.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.536.780</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.536.780</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.506.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.030.280	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>33.422.750</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>33.422.750</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.067.500	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14.434.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.921.250	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.254.800</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.254.800</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.254.800	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>13.542.500</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>13.542.500</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.542.500	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.070.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>12.070.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.980.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.460.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.080.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU</b>	<b>827.657.707</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU</b>	<b>827.657.707</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>763.264.007</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>408.218.107</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	370.778.107	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.440.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>105.767.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.767.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.615.450</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.615.450	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>145.263.450</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.615.450	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.648.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.800.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.100.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.056.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.063.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.063.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>993.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	993.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>20.331.500</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>20.331.500</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.506.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.825.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>42.006.200</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>42.006.200</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	34.006.200	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.13.0000	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG</b>	<b>702.805.126</b>	
7.01.0.00.0.00.13.0000	<b>PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG</b>	<b>702.805.126</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>635.805.126</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>386.786.671</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	356.786.671	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.500.000</b>	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.500.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>39.000.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.500.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>123.018.455</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.075.975	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.250.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.500.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.500.000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>12.500.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>32.500.000</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>32.500.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS</b>	<b>675.925.953</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS</b>	<b>675.925.953</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>597.270.453</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.990.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.990.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>342.755.423</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	303.735.423	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.440.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.580.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>73.398.170</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.925.370	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.048.800	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.424.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.299.360</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.776.880	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.830.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.827.500</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.827.500	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>29.590.000</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>4.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
<b>7.01.02.2.03</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>25.590.000</b>	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.590.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>36.065.500</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>36.065.500</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.200.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.865.500	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR</b>	<b>662.485.645</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR</b>	<b>662.485.645</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>607.005.170</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.500.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>337.499.060</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	301.439.060	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.200.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.006.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.006.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.791.210</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.692.250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.898.960	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.008.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.019.500	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.159.400	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.180.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>3.980.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.980.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2.200.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.200.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>20.500.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>20.500.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.500.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.500.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.500.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.300.475</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>24.300.475</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.500.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.800.475	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM</b>	<b>787.000.083</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM</b>	<b>787.000.083</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>719.690.083</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>375.870.150</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	373.210.150	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.660.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.200.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.498.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.438.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.310.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.523.133</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.650.333	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.300.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.860.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.598.200</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.598.200	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3.660.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.830.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.830.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1.830.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.830.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>18.330.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>18.330.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.530.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.800.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.190.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.190.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.190.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>41.200.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>41.200.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.500.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	37.700.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.930.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.930.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.930.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.17.0000	<b>PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK</b>	<b>774.390.559</b>	
7.01.0.00.0.00.17.0000	<b>PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK</b>	<b>774.390.559</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>723.390.559</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>373.619.783</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	339.059.783	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.560.000	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>480.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.766.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.105.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.664.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.496.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.500.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.679.265</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.679.265	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>138.530.826</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.838.346	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.692.480	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110.314.685</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.147.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.877.685	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.500.000	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.500.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.500.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>7.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>2.952.983.304</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>2.952.983.304</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>2.952.983.304</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.332.948.754</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>788.856.980</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	725.616.980	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.240.000	
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.990.000</b>	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.320.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.670.000	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>77.200.000</b>	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.200.000	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.980.450</b>	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.980.450	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>285.064.274</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.001.914	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.880.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.182.360	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.857.050</b>	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.857.050	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>50.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1.115.535.000</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1.115.535.000</b>	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	989.540.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125.995.000	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>19.266.250</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>19.266.250</b>	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.266.250	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>204.991.500</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>204.991.500</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	154.441.500	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.550.000	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>230.241.800</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>230.241.800</b>	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.536.750	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	189.705.050	



# BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Untuk Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp56.249.777.262 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000.

## 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Perumda Air Minum sebesar Rp15.000.000.000 dan Pembentukan Dana Cadangan untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilu Tahun 2024 sebesar Rp20.000.000.000.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar plus Rp41.249.777.262. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah minus sebesar Rp292.026.600.830 sehingga terdapat kekurangan/defisit sebesar Rp250.776.823.568. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1		
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN		
NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6. 1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>76.249.777.262</b>
6. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.249.777.262
6. 1. 02.	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>76.249.777.262</b>
<b>6. 2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>35.000.000.000</b>
6. 2. 01.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6. 2. 02.	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>41.249.777.262</b>

## **BAB VI . PENUTUP**

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah dan adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani, terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.

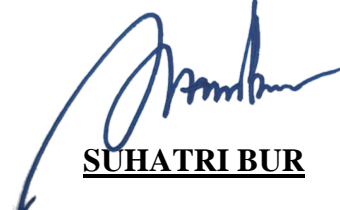
**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

  
**Ir. H. ARWINSYAH, MT**  
Ketua

  
**APRINALDI, M.Pd**  
Wakil Ketua

  
**RISDIANTO, ST**  
Wakil Ketua

**Parit Malintang, 8 Agustus 2022  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

  
**SUHATRI BUR**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
Kabupaten Padang Pariaman